

**TINDAKAN REPRESIF TALIBAN TERHADAP MEDIA DAN JURNALIS  
DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021-2024**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**Nurul Faizah**

**21323052**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**TINDAKAN REPRESIF TALIBAN TERHADAP MEDIA DAN JURNALIS  
DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Nurul Faizah**

**21323052**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINDAKAN REPRESIF TALIBAN TERHADAP MEDIA DAN**  
**JURNALIS DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021-2024**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 5 Juni 2025*



Nurul Faizah

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'aalamiin*

Telah diselesaikannya penelitian ini yang saya persembahkan untuk:

### 1. **Mama dan Bapak**

Terima kasih sudah menjadi kekuatan terbesar dalam hidup saya, baik selama perkuliahan maupun di saat pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan tanpa henti, dan dukungan yang tak pernah goyah dalam setiap langkah perjuangan. Semua ini tidak akan pernah terwujud tanpa pengorbanan dan cinta dari kalian

### 2. **Saudara dan Keluarga Besar**

Terima kasih atas dukungan, nasihat, dan perhatian yang selalu diberikan di setiap perjalanan hidup ini. Terima kasih selalu menguatkan untuk menjadi anak yang mandiri, kehadiran kalian menjadi alasan untuk terus berjuang dan melangkah lebih baik

### 3. **Rekan-Rekan HI UII Angkatan 2021**

Terima kasih telah menemani setiap langkah dalam perjalanan menuntut ilmu di HI UII, dan memberikan banyak pengalaman berharga selama kuliah. Semoga setiap hal yang diperjuangkan sesuai dengan harapan masing-masing

## HALAMAN MOTTO

“Bukan makhluk terkuat atau terpintar yang mampu bertahan, melainkan mereka yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan” - Charles Darwin

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan” - Dawn Clark

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku”  
(Qs. Asy-Syu'ara': 62)

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ ٣٥

“Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Mahasuci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu”  
(Qs. Maryam: 35)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'aalamiin*

Segala puji bagi Allah SWT. sebagai pemilik alam semesta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis masih diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dalam waktu yang sesuai target dan harapan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta sahabat, keluarga, dan para pengikutnya, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir.

Atas pertolongan dan nikmat dari Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini meskipun menyadari bahwa dalam setiap perjalanan penulisan ini banyak kekurangan, tetapi semoga siapapun yang membacanya mendapatkan kebermanfaatannya. Selama proses penulisan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Drs. Idam Hindardi dan Wiwik Yuliati. Terima kasih atas segala cinta yang tak pernah padam, segala ridho, doa yang tiada henti dan pengorbanan yang tak tau kapan akan bisa terbalaskan oleh waktu. Bapak dan Mama, selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup saya. Di saat

saya selalu gagal, mereka menjadi garda terdepan yang selalu memberikan nasihat, motivasi, dan dukungan selama saya kuliah maupun di saat pengerjaan skripsi ini. Mereka yang selalu memprioritaskan kebahagiaan anaknya, tanpa ketulusan dan cinta dari kalian, saya tidak akan mampu menyelesaikan studi ini. Semoga Bapak dan Mama selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar dapat menemani setiap proses dalam hidup saya. Dan semoga kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan, dibalas dengan keberkahan oleh Allah SWT.

2. Kakak saya, Nafiah Fitriana dan Nurfadilah Febrianti. Mereka kedua kakak yang selalu memberikan doa, nasehat, dukungan, dan perhatian yang tanpa henti. Terima kasih banyak Mba Nisa dan Mba Dila, selalu menjadi tempat saya berbagi di setiap langkah perjuangan ini dan kehadiran kalian sangat berarti dalam hidup saya. Masukan dan saran yang selalu diberikan ketika saya menghadapi suatu masalah, menjadi kekuatan hingga bisa terus melangkah.
3. Kepada Sahabat Till Jannah, Eza Mujahidah, Mifta Khul Jannah, Shavira Nadira Aliya Putri, dan Tassya Nur Zairia. Terima kasih atas dukungan, semangat dan kebersamaan yang selalu kalian berikan selama perjalanan mengemban ilmu di HI UII. Kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, lebih dari sekadar teman belajar di HI, kalian adalah keluarga yang selalu hadir di setiap fase perjuanganku. Terima kasih untuk setiap waktu yang kalian luangkan, atas setiap candaan yang dibagikan di tengah kelelahan, dan atas dorongan yang membuatku untuk terus maju. Semoga persahabatan ini akan tetap terjalin erat di masa depan, kesuksesan akan selalu menyertai langkah kita masing-masing dan terus semangat untuk melewati fase kehidupan ini.
4. Keluarga besar Civitas Akademik Universitas Islam Indonesia, terutama Bapak dan

Ibu Dosen, Staf, dan teman-teman angkatan 2021 dari Program Studi Hubungan Internasional. Terima kasih atas pengetahuan, pengalaman, bimbingan serta dan dukungan yang diberikan sepanjang proses pembelajaran yang mengantarkan pada penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah diberikan menjadi keberkahan dan amal yang bermanfaat.

5. Miss Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. Selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu di HI UII. Beliau telah menjadi bagian penting dalam proses pengembangan akademik saya hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik, Hasbi Aswar, Ph.D. Terima kasih telah membimbing saya selama masa studi di Hubungan Internasional. Bapak tidak hanya memberikan dukungan akademik dan administratif, tetapi juga memberikan arahan, nasihat, dan dukungan yang tak ternilai selama saya menempuh pendidikan di UII. Setiap kali saya menghadapi tantangan selama perkuliahan, Bapak selalu meluangkan waktu untuk bisa membimbing. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Dosen Pembimbing Skripsi, Miss Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian yang Miss karin berikan selama proses bimbingan hingga penyelesaian skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan mungkin saya tidak akan bisa sampai di tahap ini. Miss Karin yang selalu memberikan arahan dan motivasi ketika saya gagal terus sehingga menjadi penyemangat saya tersendiri di saat lelah. Terima kasih sudah mempermudah setiap proses dan selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang. Segala pengetahuan,

wawasan, dan pengalaman yang saya peroleh selama bimbingan ini akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik maupun pengembangan keilmuan di masa depan. Segala kebaikan dan pengajaran yang Miss Karin berikan, semoga menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

8. Dan terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yaitu Nurul Faizah (penulis). Terima kasih atas keyakinan diri untuk terus maju, keberanian untuk bermimpi, dan ketangguhan untuk tidak menyerah dan mampu melewati setiap rintangan yang ada. Untuk setiap air mata yang jatuh dalam kesendirian, untuk setiap malam yang dihabiskan dalam keraguan, dan untuk setiap langkah kecil yang diambil meskipun hati lelah, semua tak ada yang sia-sia. Setiap lembar yang tertulis adalah hasil dari perjuangan meskipun terkadang mentalnya tidak kuat untuk melanjutkan dan jalan yang dilalui tidak selalu mudah. Skripsi ini adalah bukti bahwa penulis mampu melawan rasa takut, mampu menyelesaikan apa yang telah di mulai, dan tetap percaya pada proses serta impian. Semoga penulisan ini menjadi langkah awal dari perjalanan yang lebih baik di masa depan.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>10</b>
<b>1.7 Argumen Sementara .....</b>	<b>12</b>
<b>1.8 Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>1.8.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>14</b>
<b>1.8.4 Proses Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB 2 KEBEBASAN MEDIA DAN JURNALIS DI AFGHANISTAN.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 Media Mengkritik Penguasa .....</b>	<b>17</b>
<b>2.2 Reaksi Taliban Terhadap Ancaman Narasi.....</b>	<b>21</b>
<b>2.2.1 Kekerasan Terus Berlanjut Terhadap Media dan Jurnalis .....</b>	<b>21</b>
<b>2.2.2 Aturan Jurnalisme.....</b>	<b>26</b>

<b>2.3</b> Ketiaadaan Demokrasi Dalam Perlindungan Media.....	31
<b>BAB 3 ANALISIS TINDAKAN REPRESIF TALIBAN TERHADAP MEDIA DAN JURNALIS DI AFGHANISTAN .....</b>	<b>38</b>
<b>3.1.</b> Analisis Faktor <i>Dissent provokes</i> Dalam Tindakan Represif Taliban .....	38
<b>3.2</b> Analisis Faktor <i>Repression persist</i> Dalam Tindakan Represif Taliban .....	43
<b>3.3</b> Analisis Faktor <i>Democracies pacify</i> Dalam Tindakan Represif Taliban .....	48
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1</b> Kesimpulan .....	53
<b>4.2</b> Rekomendasi.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Media yang Beroperasi di Afghanistan .....	4
--	---

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jurnalis yang Terbunuh di Afghanistan .....	18
Grafik 2.2 Indeks Kebebasan Pers .....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jurnalis Kehilangan Pekerjaan.....	33
Gambar 2.2 Strategi Media dan Jurnalis Afghanistan.....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Analisis Studi Kasus .....	53
--	----

## DAFTAR SINGKATAN

AFJC	: <i>Afghanistan Journalists Center</i>
AIJA	: <i>Afghan Independent Journalists Association</i>
CPJ	: <i>Committee to Protect Journalists</i>
GDI	: <i>General Directorate of Intelligence</i>
GMIC	: <i>Government Media and Information Centre</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HHI	: Hukum Humaniter Internasional
HRW	: <i>Human Rights Watch</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RSF	: <i>Reporters Without Borders</i>

## ABSTRAK

Sejak Taliban berkuasa pada 15 Agustus 2021, sebagian besar sistem media yang bebas dan dinamis runtuh dalam sekejap. Tindakan represif yang dilakukan Taliban dapat dilihat dalam beberapa konteks terutama terkait pembatasan kebebasan berekspresi. Pembatasan dan ketentuan ketat yang diberlakukan oleh Taliban menyebabkan merajalelanya sensor mandiri di kalangan media. Taliban telah mengintimidasi jurnalis dan mengurangi kebebasan yang mengakibatkan penutupan lebih dari dua ratus organisasi berita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa pemerintah Taliban menggunakan kebijakan represif terhadap media dan jurnalis di wilayah konflik Afghanistan. Penelitian ini menggunakan teori *state repression* oleh Christian Davenport yang terdiri dari tiga faktor penjelas yang mendorong perilaku represif: *dissent provokes*, *repression persists*, dan *democracies pacify*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan literatur melalui situs online, khususnya laporan resmi Reporters Without Borders (RSF) dan Afghan Independent Journalists Association (AIJA). Penelitian ini menemukan bahwa adanya tindakan represif Taliban untuk membentuk sistem kebebasan media di bawah kendalinya, tidak hanya menghambat kebebasan jurnalisisme tetapi juga menciptakan lingkungan yang berbahaya bagi jurnalis.

**Kata-kata kunci:** *jurnalisisme di Afghanistan, kebebasan berekspresi, represi media, Taliban*

## ABSTRACT

Since the Taliban came to power on 15 August 2021, a largely free and vibrant media system has collapsed in an instant. The repressive measures taken by the Taliban can be seen in several contexts, especially regarding restrictions on freedom of expression. The strict restrictions and conditions imposed by the Taliban led to rampant self-censorship among the media. The Taliban has intimidated journalists and curtailed freedoms resulting in the closure of more than two hundred news organisations. This research aims to analyse why the Taliban government uses repressive policies against the media and journalists in Afghanistan's conflict areas. This research uses Christian Davenport's theory of state repression which consists of three explanatory factors that drive repressive behaviour: *dissent provokes*, *repression persists*, and *democracies pacify*. The method used is a qualitative method using literature through online sites, especially the official reports of the Reporters Without Borders (RSF) and Afghan Independent Journalists Association (AIJA). The research found that the Taliban's repressive measures to establish a system of media freedom under its control not only hampered journalism freedom but also created a dangerous environment for journalists.

**Keywords:** *Freedom of expression, Journalism in Afghanistan, Media repression, Taliban*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Momen penarikan AS dari Afghanistan pada Agustus 2021 berhasil dimanfaatkan Taliban untuk kembali berkuasa. Pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban pada bulan Agustus membuat banyak terjadi pelanggaran HAM. Pada awal tahun 2021, konflik terus menimbulkan dampak yang sangat parah bagi perempuan dan anak perempuan. Taliban memberlakukan praktik sosial yang menindas dan membatasi kebebasan bergerak perempuan, sehingga banyak perempuan kehilangan pekerjaannya. Perempuan dan anak perempuan menghadapi peningkatan hambatan dalam mengakses layanan dasar dan bantuan kemanusiaan, dan laporan mengenai kekerasan berbasis gender pun meningkat. Taliban juga membubarkan Kementerian Urusan Perempuan dan tidak mengangkat perempuan ke posisi tingkat kabinet (GOV.UK 2023).

Menurut Human Rights Watch, sejak tahun 2021 ditemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa persekusi yang mengincar perempuan dan anak perempuan telah diberlakukan melalui berbagai keputusan tertulis atau pengumuman. Keputusan-keputusan itu sangat membatasi kebebasan bergerak, berekspresi, dan berserikat. Adanya larangan untuk bekerja di hampir semua jenis pekerjaan, adanya larangan mengakses pendidikan menengah dan tinggi serta mengizinkan penangkapan sewenang-wenang dan pelanggaran hak atas kebebasan (Human Rights Watch 2023).

Jatuhnya Afghanistan pada bulan Agustus 2021 menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah negara tersebut, yang mengakibatkan perubahan besar di berbagai sektor, termasuk media. Secara historis, media berfungsi sebagai simbol kebebasan dan perwujudan aspirasi demokrasi di dalam negeri. Namun, lanskap media saat ini di Afghanistan telah hancur di bawah kekuasaan Taliban. Kembalinya mereka ke tampuk kekuasaan telah mengantarkan pada periode penindasan yang parah dan jurnalisme independen yang pernah berkembang pesat, kini menghadapi ancaman eksistensial (Mujtaba Haris 2024).

Tindakan represif yang dilakukan Taliban dapat dilihat dalam beberapa konteks terutama terkait pembatasan kebebasan berekspresi. Pada saat Taliban mengambil alih kekuasaan, kebebasan berekspresi dihambat dan media dilarang untuk memberikan liputan yang kritis terhadap pemerintah. Meskipun sebagian besar media Afghanistan tetap bebas dan independen hingga bulan Agustus, namun terdapat pembunuhan yang ditargetkan terhadap jurnalis, aktivis masyarakat sipil, dan pembela hak asasi manusia yang sebagian besar disebabkan oleh Taliban. Sejak bulan Agustus dan seterusnya, Taliban memberlakukan pembatasan terhadap media dan banyak media terpaksa tutup. Jurnalis, aktivis masyarakat sipil dan pembela HAM dilecehkan, dibunuh dan ditangkap sehingga menyebabkan peningkatan sensor mandiri (Reporters Without Borders 2021a).

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan, sebuah survei yang dilakukan oleh Reporters Without Borders (RSF) dan Afghan Independent Journalists Association (AIJA) menunjukkan terjadi perubahan radikal dalam lanskap media Afghanistan. Sebanyak 231 media terpaksa ditutup dan lebih dari 6.400 jurnalis kehilangan pekerjaan sejak 15 Agustus. Jurnalis perempuan adalah kelompok yang paling terkena dampaknya, dimana jurnalis perempuan tidak lagi bekerja. Media di

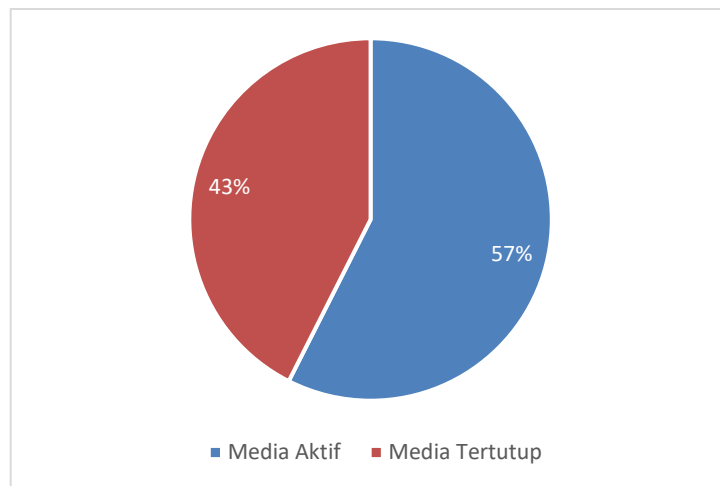
Afghanistan diharuskan mematuhi 11 aturan jurnalisisme, perintah delapan artikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Taliban mengenai doktrin Islam. Peraturan jurnalisisme yang berbahaya ini membuka jalan bagi penyensoran dan penganiayaan, yang secara efektif merampas independensi jurnalis. Mereka menetapkan kerangka peraturan berdasarkan prinsip dan metode yang bertentangan dengan praktik jurnalisisme dan memberikan ruang bagi penindasan dimana aturan-aturan ini membuka jalan penganiayaan (Reporters Without Borders 2021b).

Banyak pelanggaran HAM yang didokumentasikan oleh Misi PBB di Afghanistan. Taliban telah mengintimidasi jurnalis dan mengurangi kebebasan yang mengakibatkan penutupan lebih dari dua ratus organisasi berita. Capaian media sebelumnya telah menghadapi ancaman signifikan dari Taliban, yang mengakibatkan penutupan 39,59% outlet media dan hilangnya lapangan pekerjaan bagi 59,86% jurnalis perempuan, yang menyebabkan tidak adanya jurnalis perempuan sama sekali di 11 provinsi (Lindsay 2023).

Pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban telah mengubah lanskap media secara radikal. Afghanistan memiliki sekitar 543 outlet media yang mempekerjakan sekitar 10.790 pekerja media. Namun, pada akhir November 2021 tersisa hanya 312 outlet media yang masih beroperasi. Sehingga hanya menyisakan 4.360 pekerja media. Ini menunjukkan bahwa 43% media Afghanistan menghilang dalam kurun waktu tiga bulan (Reporters Without Borders 2021). Sebagian besar provinsi di Afghanistan memiliki setidaknya sepuluh media milik swasta, namun kini beberapa daerah hampir tidak memiliki media lokal sama sekali. Dulunya terdapat 10 media di wilayah pegunungan di provinsi Parwan, namun kini hanya tiga yang berfungsi. Taliban yang menguasai banyak daerah menerapkan persyaratan pada media lokal, termasuk tidak mempekerjakan jurnalis perempuan sama sekali. Lanskap media

saat ini sebagian besar tidak memiliki jurnalis perempuan, bahkan di wilayah seperti Kabul yang biasanya memiliki lebih banyak jurnalis perempuan (Reporters Without Borders 2021b).

**Diagram 1.1 Media yang Beroperasi di Afghanistan**



Sumber: Reporters Without Borders (2021)

Penyerangan terhadap jurnalis terus terjadi setiap tahunnya. Jurnalis menghadapi hambatan yang semakin signifikan dalam pekerjaan mereka. Pada awal kekuasaan Taliban, terjadi penggerebakan di rumah-rumah jurnalis, penganiayaan, penangkapan, dan paksaan terhadap jurnalis perempuan untuk menghentikan siaran mereka. Kemudian pada tahun 2022, munculnya GDI yang didominasi Haqqani menyebabkan Taliban memperlakukan jurnalis lebih keras, mewajibkan semua perempuan menutupi wajah mereka di tempat umum, dengan perintah agar semua presenter TV perempuan mengenakan masker saat siaran. Pada tahun 2023, jurnalis terus menghadapi serangan, penangkapan, dan ancaman, termasuk serangan bom oleh ISIS selama upacara penghargaan jurnalis yang mengakibatkan kematian satu jurnalis yaitu Hosein Naderi dan melukai 16 orang lainnya (Atif Aryan 2023).

Kebebasan berpendapat dan akses informasi yang mulai berkembang selama dua dekade terakhir kehilangan esensinya dengan kembalinya Taliban. Pembatasan dan ketentuan ketat yang diberlakukan oleh Taliban menyebabkan merajalelanya sensor mandiri di kalangan media lokal. Hal ini menguntungkan Taliban, karena mereka dapat meningkatkan pembatasan pers secara diam-diam, dan jauh dari pengawasan komunitas global. Jurnalis yang berani melanggar batas-batas ini menghadapi pembalasan keras dari Taliban.

Menurut Hukum Humaniter Internasional, jurnalis yang ditugaskan meliput berita di daerah konflik dalam yurisdiksi mereka berhak mendapatkan perlindungan yang sama dengan warga sipil, asalkan mereka tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran. Perlindungan jurnalis yang berperan di zona konflik diatur oleh beberapa perjanjian, termasuk Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977, Konvensi Den Haag tahun 1907, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap jurnalis juga diklasifikasikan sebagai kejahatan perang berdasarkan yurisdiksi material Statuta Roma. Ketentuan mengenai perlindungan jurnalis juga tertuang dalam Pasal 79 Protokol Tambahan Tahun 1977 yang menyatakan bahwa jurnalis atau pers dianggap sebagai warga sipil yang berhak memperoleh perlindungan.

Tindakan represif yang dilakukan Taliban sudah sangat jelas melanggar Konvensi Jenewa termasuk pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, dan ancaman lainnya. Di sisi lain, media diharuskan mematuhi aturan dari Taliban yang harus mengikuti prinsip-prinsip Islam dan nasional, namun peraturan tersebut tidak jelas karena tidak ada pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Islam. Begitu banyak tindakan represif yang dilakukan Taliban sehingga melanggar prinsip media dan Jurnalis di wilayah Afghanistan. Hal inilah yang

membuat penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Tindakan Represif Taliban Terhadap Media dan Jurnalis di Afghanistan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini adalah *mengapa pemerintah Taliban menggunakan kebijakan represif terhadap media dan jurnalis di wilayah konflik Afghanistan?*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan mengkaji bentuk dan dampak dari tindakan represif Taliban terhadap media dan jurnalis di Afghanistan
2. Untuk menganalisis mengapa pemerintah Taliban menggunakan kebijakan represif terhadap media dan jurnalis di Afghanistan

## **1.4 Cakupan penelitian**

Cakupan penelitian ini meliputi tindakan represif Taliban terhadap media dan jurnalis di Afghanistan dalam rentang waktu 2021-2024. Afghanistan menjadi salah satu tempat berbahaya bagi media dan jurnalis karena perang terpanjang selama empat dekade yang terjadi di negara tersebut. Media dan jurnalis dari waktu ke waktu seringkali menjadi sasaran kekerasan dari berbagai individu, kelompok, maupun pemberontak bersenjata yang tidak dikenal. Meskipun kebebasan media dijamin secara hukum, tetapi kekerasan terhadap media dan jurnalis telah meningkat dalam beberapa tahun yang merupakan masalah yang memprihatinkan bagi media dan masyarakat sipil

di Afghanistan.

Kemudian, periode 2021 ini dipilih karena periode tersebut adalah titik balik kekuasaan dan awal dari era baru otoriter Taliban. Setelah Taliban berkuasa, terjadi perubahan drastis terhadap struktur hukum, kebebasan sipil, dan kontrol media. Taliban menghapuskan undang-undang media tentang akses informasi yang sebelumnya menjamin hak untuk mengakses informasi dan mengeluarkan serangkaian peraturan yang bertentangan dengan undang-undang media sebelumnya yang terdiri tiga peraturan termasuk 11 aturan jurnalisme, perintah yang terdiri dari delapan artikel untuk stasiun televisi, dan beberapa arahan lisan. Kemudian tahun 2022-2024, Taliban tidak hanya berkuasa tetapi juga mulai membentuk sistem pemerintahannya dan dari tahun ke tahun kekerasan terhadap media dan jurnalis masih berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini secara umum akan membahas mengenai kekuasaan represif Taliban yang mengakibatkan banyak pelanggaran terhadap media dan hak jurnalis di Afghanistan.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber literatur yang telah diteliti secara mendalam oleh peneliti terdahulu dan relevan dengan topik yang ingin diteliti oleh penulis.

Jurnal pertama berjudul *Afghan journalists in a balancing act: Coping with deteriorating security* yang ditulis oleh Elisabeth Eide, Abdul Mujeeb Khalvatgar & Hasina Shirzad, *conflict & communication online* (2019). Kajian ini meneliti tentang strategi bertahan jurnalis terhadap ancaman. Dalam laporannya menggunakan metode kuisisioner dengan menyajikan gambaran situasi jurnalisme di Afghanistan, termasuk lanskap media dan sejarahnya, kemudian merangkum

penelitian yang relevan terhadap jurnalis Afghanistan dan memberikan hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan 28 reporter dari berbagai negara, wilayah, etnis, dan media. Tujuan kajian ini merangkum tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para jurnalis di sebuah negara yang situasi keamanannya telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dan juga penutupan media. Temuan menunjukkan bahwa jurnalis Afghanistan terjebak dalam tindakan penyeimbangan antara pemberontak yang melakukan kekerasan dan pihak berwenang yang represif. Kajian ini menunjukkan bahwa jurnalis Afghanistan memandang situasi keamanan mereka sebagai sebuah ancaman. Mayoritas dari mereka telah menghadapi situasi kekerasan dan ancaman (Eide 2019).

Jurnal kedua berjudul *Expat Afghan Media and Local Media amidst Taliban Constraints* yang ditulis oleh Ahmad Zubair Jamshidi, *International Journal of Social Science and Humanities Research* (2024). Jurnal ini mengkaji terkait perbandingan kebebasan media diaspora dan media lokal. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dinamika unik, perjuangan, dan ketahanan yang ditunjukkan oleh entitas-entitas media ketika mereka menavigasi lingkungan kompleks yang ditandai dengan sensor, masalah keamanan, dan pergeseran politik. Metode yang digunakan penulis adalah analisis komprehensif terhadap studi kasus, laporan, dan analisis konten. Tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan tentang peran media dalam membentuk wacana publik, mendorong kebebasan berekspresi, dan menumbuhkan rasa identitas dan rasa memiliki di kalangan masyarakat Afghanistan selama masa-masa sulit. Temuan menunjukkan bahwa jurnalis dan aktivis Afghanistan, baik di dalam negeri maupun diaspora telah menunjukkan ketahanan dan keberanian yang luar biasa dalam memperjuangkan kebenaran dan komitmen mereka untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Meskipun

menghadapi ancaman terhadap keselamatan pribadi, sensor, dan kesulitan ekonomi, mereka terus memenuhi peran penting. Dedikasi mereka dalam menegakkan prinsip-prinsip jurnalisme dan kebebasan berekspresi tetap menjadi kekuatan penting dalam menghadapi kesulitan (Ahmad Zubair Jamshidi 2024).

Jurnal ketiga berjudul *The Working Conditions and Challenges of Afghan Female Journalists* yang ditulis oleh Mohammad Yousaf Saddiqi, Elif Kucuk Durur, *American Journal of Applied Psychology* (2022). Penelitian ini membahas isu diskriminasi gender dalam dunia jurnalisme. Taliban melihat perempuan yang bekerja di media tidak terlalu positif, namun tetap saja jurnalis perempuan Afghanistan tetap melakukan pekerjaannya. Masalah keamanan masih sering dialami Jurnalis perempuan di Afghanistan dan juga mendapat perlakuan diskriminasi saat bekerja baik itu di dalam maupun di luar kantor. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi kerja dan tantangan utama jurnalis perempuan Afghanistan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih tertarik pada aktivitas media karena adanya perlindungan hukum dan ruang terbuka yang disediakan media. Namun, seiring waktu dan lingkungan keamanan yang memburuk kehadiran ini berkurang dan jumlah jurnalis perempuan juga menurun berkurang karena berbagai alasan. Tantangan bagi jurnalis perempuan tidak terbatas pada kurangnya keamanan di negara tersebut tetapi juga gaji rendah, diskriminasi, pelecehan di tempat kerja, dan lainnya. Terlepas dari tantangan yang ada, perempuan di Afghanistan telah didorong untuk bekerja di media selama bertahun-tahun. Namun dalam hal ini masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan seperti Afghanistan belum menerima perempuan sebagai aktivis media (Saddiqi dan Durur 2022).

Jurnal keempat berjudul *Afghanistan's Media Developments and*

*Challenges in the Past Two Decades: A Short Glance at Media Freedom* yang ditulis oleh Masom Jan Masomy, *The Central and Eastern European Online Library* (2022). Penelitian ini membahas tentang tinjauan historis perkembangan media Afghanistan. Tujuan penelitian ini adalah melihat status kebebasan media, proses perkembangan dan tantangan yang terus berlanjut terhadap kebebasan media dan jurnalis. Temuan menunjukkan bahwa sejak dua dekade setelah 9/11, media masih mempertahankan tanggung jawabnya di Afghanistan untuk bangkit dan mempromosikan hak, kesetaraan, keadilan, dan menyebarkan kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial. Meskipun terdapat tantangan yang terus berlanjut, media dan jurnalis telah mencapai kemajuan luar biasa yang mengakibatkan kerugian pada kehidupan pribadi mereka dari waktu ke waktu karena ancaman ketidakamanan, perang dalam pemerintahan serta serangan Taliban dan ISIS. Media dan jurnalis tetap menjalankan tanggung jawab mereka meskipun terdapat risiko yang merugikan mereka dan keluarga (Jan Masomy 2022).

Keempat jurnal di atas fokus pada situasi jurnalisme di Afghanistan, kondisi dan tantangan terhadap jurnalis perempuan serta kebebasan media di Afghanistan. Berdasarkan literatur yang diuraikan di atas, penulis melihat bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tindakan represif Taliban terhadap media dan jurnalis di Afghanistan baik dalam bentuk fisik maupun struktural. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan pada Taliban sebagai aktor negara yang otoriter melakukan represi terhadap media dan jurnalis Afghanistan pada tahun 2021-2024 dengan menggunakan teori *state repression*.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Christian Davenport dalam buku *State Repression and the Domestic Democratic Peace* menjelaskan bahwa represi secara konsisten menggambarkan tindakan pemaksaan negara yang ditujukan terhadap mereka yang mempunyai kekuasaan di pemerintahan. Mengenai alasan pihak berwenang menggunakan perilaku represif ini, sebagian besar merujuk pada tujuan tertentu untuk mempengaruhi pemikiran dan memenuhi kebutuhan tertentu di dalam negara khususnya pejabat pemerintah yang kejam atau sistem politik tertentu. Otoritas politik sering kali melakukan penindasan terhadap mereka yang berada di bawah kekuasaannya, dan faktor serta perilaku struktural tertentu secara konsisten dikaitkan dengan perilaku ini (Davenport 2007, 33).

Davenport menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui represi negara adalah kelangsungan hidup, masa jabatan, persetujuan perilaku, legitimasi politik, pengurangan rasa takut, dan ekstraksi sumber daya. Represi serupa dengan konsep kontrol sosial, yang menitikberatkan pada upaya koersif dan non-koersif untuk mengontrol orang lain. Tindakan koersif yang diterapkan oleh negara diyakini dapat membantu membentuk sistem politik untuk menjaga dan mempertahankan integritasnya di saat terjadi perlawanan dan tantangan (Davenport 2007, 36).

Ada tiga faktor penjas yang mendorong perilaku represif di antaranya; pertama, *dissent provokes* adalah perbedaan pendapat politik yang mendorong aktor negara meresponnya dengan tindakan represif seperti merespon aksi pemogokan, demonstrasi, perang gerilya, terorisme dan perang saudara. Dalam hal ini, negara dapat memenuhi salah satu tujuan utamanya yaitu kontrol politik. Seringkali negara melihat represi sebagai cara untuk mengontrol ketidakpuasan dan menjadi sumber

utama bagi legitimasi pemerintah. Dalam konteks ini, semakin adanya perbedaan pendapat maka perilaku represif negara semakin meningkat untuk melakukan pemaksaan dan juga membuat tindakan negara sebagai tindakan hukum dan ketertiban untuk mengurangi pandangan negatif. Kedua, *repression persists* adalah represi yang terus dilakukan untuk menjaga kekuasaan bahkan tanpa adanya kritik yang membuat para pemimpin politik menggunakan tindakan represif, sehingga mengurangi ketidakpastian. Dalam hal ini, penerapan pemaksaan dan pencapaian ketertiban politik menjadi peluang untuk bergerak ke arah perilaku represif tersebut. Ketiga, *democracies pacify* adalah kondisi demokratisasi yang cenderung mengurangi paksaan negara terhadap represi yang terus berlangsung sepanjang waktu. Demokrasi menciptakan kondisi damai apabila adanya akuntabilitas pemimpin politik. Negara demokrasi cenderung tidak menggunakan represi, hal ini karena adanya norma-norma demokrasi yang membatasi dan demokrasi meningkatkan biaya sanksi yang dikenakan kepada pihak atas perilakunya yang represif. Sehingga, dalam hal ini apabila tingkat demokrasi tidak mencapai level tertentu dalam beberapa waktu maka tidak akan bisa mengurangi perilaku represif (Davenport 2007, 39-41).

### **1.7 Argumen Sementara**

Dalam penelitian ini, ada tiga faktor penjelas yang mendorong perilaku represif Taliban terhadap media dan jurnalis menurut Christian Davenport yaitu; *dissent provokes*, bagaimana konflik yang terjadi di Afghanistan selama beberapa dekade memberikan tantangan bagi media dan jurnalis. Banyak jurnalis Afghanistan yang ditangkap, dianiaya, diintimidasi karena melakukan aksi protes terhadap kebijakan Taliban. *Repression persists*, yaitu bagaimana Taliban telah

mengimplementasikan sejumlah undang-undang dan kebijakan yang melanggar hak-hak dasar jurnalis. Adanya undang-undang media baru untuk menyelaraskan undang-undang tersebut dengan hukum syariah Islam. Dalam hal ini, undang-undang dan peraturan tersebut tidak menjamin hak-hak media dan jurnalis tetapi Taliban hanya mengatur aktivitas media berdasarkan kebijakan ideologis mereka dengan mengeluarkan perintah media. *Democracies pacify*, yaitu bagaimana Taliban tidak memiliki mekanisme yang mendorong penyelesaian konflik secara damai, melainkan semakin diperparah dengan kekosongan hukum di Afghanistan sehingga Taliban melakukan tindakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan berdasarkan hukum syariah Islam. Demokrasi yang tidak mencapai level di Afghanistan seperti tidak adanya kebebasan pers membuat Taliban melakukan tindakan represi untuk mengontrol narasi publik karena Taliban menolak kebebasan pers sebagai hak dasar. Oleh karena itu, argumen sementara dalam penelitian ini adalah adanya kebijakan ketat yang diberlakukan Taliban telah mengubah lanskap media dan jurnalis di Afghanistan dengan tiga faktor penjelas yang mendorong tindakan represif Taliban yaitu *dissent provokes*, *repression persists*, dan *democracies pacify*.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering digunakan dalam menganalisis masalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan mengkaji data secara mendalam tentang segala kompleksitas yang ada dalam penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun gambar yang tidak menekankan pada angka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis sumber data sekunder atau studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu meliputi buku, jurnal, situs web, serta laporan resmi dari Reporters Without Borders (RSF), Afghan Independent Journalists Association (AIJA), organisasi internasional serta lembaga pemerintah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah Taliban sebagai pemegang kekuasaan secara *de facto* di Afghanistan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tindakan represif Taliban terhadap media dan jurnalis di Afghanistan. Penelitian ini akan menganalisis tindakan represif Taliban terhadap media dan jurnalis di Afghanistan pada tahun 2021-2023 dengan menggunakan teori *state repression*.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan pengumpulan data dari sumber-sumber yang terpercaya. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan data yang sebelumnya telah tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui pemeriksaan sumber-sumber tertulis dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen dan laporan resmi dari Reporters Without Borders (RSF), serta data yang tersedia secara resmi di situs web pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

#### *1.8.4 Proses Penelitian*

Dalam proses penelitian, langkah awal yang dilakukan penulis adalah mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan penelitian. Kemudian, penulis mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui sumber buku, jurnal, data pemerintah, dan data statistik yang berkaitan dengan pembatasan media dan penyerangan terhadap jurnalis di Afghanistan. Penulis juga mengumpulkan berbagai publikasi yang menunjukkan bahwa Taliban menggunakan kebijakan represif yang berdampak pada pelanggaran hak atas kebebasan jurnalis. Setelah itu, penulis melakukan studi literatur untuk memastikan bahwa penelitian ini baru dan tidak sama dengan penelitian terdahulu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis, dan disajikan untuk digunakan pada pembahasan terhadap hasil penelitian, Selanjutnya, penulis membuat kesimpulan atas data-data yang telah dikumpulkan untuk menyusun hasil penelitian dalam bentuk penulisan skripsi.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Secara sistematis, penelitian ini akan diuraikan menjadi empat bab utama, dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB 2: KEBEBASAN MEDIA DAN JURNALIS DI AFGHANISTAN**

Pada bab kedua ini akan membahas mengenai media mengkritik aktor negara, reaksi Taliban terhadap ancaman narasi dan ketiadaan demokrasi dalam perlindungan media.

### BAB 3: ANALISIS TINDAKAN REPRESIF TALIBAN TERHADAP MEDIA DAN JURNALIS DI AFGHANISTAN

Pada bab ketiga ini akan menganalisis tindakan represif Taliban terhadap media dan jurnalis di Afghanistan pada tahun 2021-2023. Bab ini akan mengaplikasikan teori *state repression* terhadap studi kasus yang telah direncanakan sebelumnya. Penulis akan menganalisis tindakan represif Taliban melalui faktor *dissent provokes*, *repression persists*, dan *democracies pacify* dalam tindakan represif menurut Christian Davenport.

### BAB 4: PENUTUP

Pada bab keempat ini akan menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran dan rekomendasi yang nantinya berguna bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

## **BAB 2**

### **KEBEBASAN MEDIA DAN JURNALIS DI AFGHANISTAN**

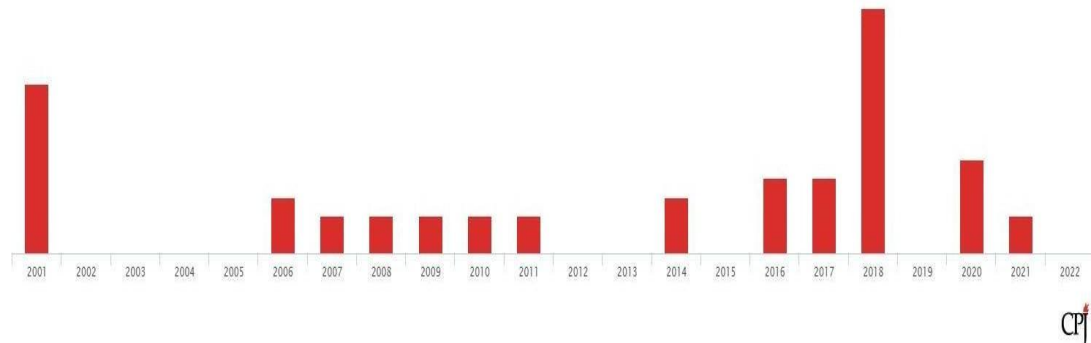
#### **2.1 Media Mengkritik Penguasa**

Di wilayah yang dikuasai pemerintah, media Afghanistan memainkan peran aktif dalam kehidupan publik dan terlibat dalam isu-isu publik. Namun, jurnalis yang kritis terhadap pemerintah berisiko menghadapi ancaman dan kekerasan dari pejabat pemerintah, pasukan keamanan, dan milisi yang didukung pemerintah. Mereka menghadapi pembatasan akses informasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Di Afghanistan, media hanya diperbolehkan masuk ke wilayah yang dikuasai Taliban dengan izin tertulis dari Taliban. Pejabat Taliban telah menyatakan bahwa mereka hanya meminta jurnalis untuk menghormati nilai-nilai Islam. Namun, komandan Taliban telah mengancam dan menyerang jurnalis karena membuat laporan kritis. Pejabat Taliban telah melarang penayangan televisi di beberapa distrik, dan warga yang menonton melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tidak hanya itu, beberapa pejabat Taliban juga telah memberlakukan pembatasan penggunaan smartphone bahkan melarangnya sepenuhnya, sehingga sangat membatasi akses warga terhadap informasi dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi, belajar, atau bekerja menggunakan internet (Human Rights Watch 2020).

Taliban menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap lanskap media. Pemerintah Afghanistan belum menangani insiden kekerasan terhadap jurnalis yang diduga dilakukan oleh staf pemerintah, khususnya pasukan keamanan. Pemerintah belum memberikan dukungan yang diperlukan sebagaimana diamanatkan oleh hukum dan telah memberikan tekanan yang merupakan tantangan besar bagi

kebebasan berekspresi.

**Grafik 2.1 Jurnalis yang Terbunuh di Afghanistan**



Sumber: Committee to Protect Journalists (CPJ)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2001-2020, sekitar 52 jurnalis dan pekerja media terbunuh di Afghanistan. Menurut data CPJ, tahun 2001 terdapat 9 kasus kematian yang meliputi kasus pembunuhan dan tembakan. Kemudian tahun 2006, terdapat 3 kasus kematian saat meliput berita. Tahun 2007-2011 terdapat 12 kasus kematian, tahun 2014 terdapat 3 kasus kematian dan tahun 2017 terdapat 4 kasus kematian. Sedangkan di tahun 2018 adalah tahun dengan 15 kasus kematian terbanyak yang meliputi kasus pembunuhan, dan kasus yang belum dikonfirmasi. Dan tahun 2020 ada sebanyak 5 kasus pembunuhan. Dari jumlah tersebut, 27 jurnalis menjadi sasaran dengan sengaja (Committee to Protect Journalists, t.t.).

Pada saat Taliban kembali berkuasa pada bulan Agustus 2021, Taliban telah mengadopsi strategi media baru yang menggabungkan dua pendekatan mereka pada periode pemerintahan tahun 1990-an dan pendekatan media khusus yang dikembangkan selama dua dekade pemberontakan (*Media Capture Strategies in an Islamic Authoritarian Context: The Case of the Taliban* 2023). Pada tahun 2021, beberapa media seperti Tolonews melakukan aksi protes selama dua hari di Kabul untuk memperjuangkan hak perempuan dan menuntut kesetaraan, keadilan dan

demokrasi. Media lokal Etilaatroz melaporkan bahwa Taliban menggunakan gas air mata untuk mencegah mereka mencapai istana presiden Afghanistan. Akibatnya, satu wanita menjadi korban pemukulan dengan darah mengalir di kepalanya (Bilal Guler 2021).

Pada September 2021, Taliban menahan dan kemudian membebaskan setidaknya 14 jurnalis yang meliput protes di Kabul. Menurut berbagai laporan berita dan individu yang mengetahui insiden tersebut, setidaknya sembilan dari jurnalis tersebut mengalami kekerasan selama penangkapan atau penahanan mereka. Menurut Etilaatroz dan Los Angeles Times, Taliban telah menahan Taqi Daryabi dan Nematullah Naqdi, seorang editor video dan reporter video dari surat kabar harian Etilaatroz, setelah mereka meliput protes yang sedang berlangsung di Kabul. Taqi Daryabi dan Naqdi memberitahu Agence France-Presse bahwa pejuang Taliban menyerang mereka dengan tongkat, kabel listrik, dan cambuk setelah menuduh mereka mengorganisir protes. Taqi Daryabi juga mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa dia didorong ke tanah dan dipukul hingga pingsan saat berada dalam tahanan Taliban. Naqdi melaporkan kepada AFP bahwa pejuang Taliban menghina dia dan menendang kepalanya, serta menginjak kepalanya dan menabrakkan wajahnya ke beton (Committee to Protect Journalists 2021).

Kemudian pada maret 2022, jurnalis Tolonews ditahan karena mengkritik kebijakan Taliban terkait tayangan hiburan dan pembatasan terhadap jurnalis perempuan. Petugas Taliban menangkap Bahram Aman, Khpalwak Sapai, dan Nafay Khaleeq. Penangkapan tiga jurnalis menandai insiden terbaru dalam serangkaian serangan terhadap media di Afghanistan. Menurut AIJA, 40 jurnalis telah ditahan sementara oleh Taliban sejak mereka mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021. IFJ menyatakan bahwa penangkapan jurnalis Tolonews merupakan

bukti lebih lanjut dari penindasan Taliban terhadap liputan kritis dan pengabaian terang-terangan mereka terhadap kebebasan pers. IFJ mendesak Taliban untuk membiarkan media Afghanistan beroperasi secara independen dan segera menghentikan penahanan yang tidak adil terhadap jurnalis dan pekerja media (International Federation of Journalists 2022).

Menurut RSF, setidaknya 50 jurnalis dan pekerja media telah ditahan sementara dan ditangkap oleh Taliban. Penangkapan ini sering disertai dengan kekerasan, berlangsung dari beberapa jam hingga hampir seminggu. Adanya penahanan ini terjadi ketika jurnalis meliput demonstrasi jalanan yang dilakukan oleh perempuan di ibu kota Kabul, sehingga menunjukkan peran Taliban yang semakin besar dalam mengganggu media. RSF mengancam lonjakan ancaman, panggilan interogasi, dan penangkapan sewenang-wenang yang dihadapi oleh jurnalis dan media selama dua bulan terakhir di Afghanistan. Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penyebaran Kebajikan terlibat langsung dalam intimidasi ini, yang melanggar undang-undang pers Afghanistan (Reporters Without Borders 2022).

Jurnalis menghadapi tantangan yang semakin signifikan dalam pekerjaan mereka, ditambah dengan prospek suram untuk masa depan lanskap media yang dinamis yang telah berkembang di negara itu selama dua dekade terakhir. Ketidakamanan menimbulkan tantangan yang signifikan bagi media dan jurnalis. Media dan jurnalis terus-menerus mengalami kurangnya rasa aman. Mereka sering menjadi sasaran berbagai faksi politik, kelompok bersenjata, individu dan sebagainya (Abdul Mujeeb Khalvatgar, t.t.).

Independensi media terus menjadi isu besar di Afghanistan, karena partai politik dan politisi tertentu juga memiliki media dan mengklaim bahwa media

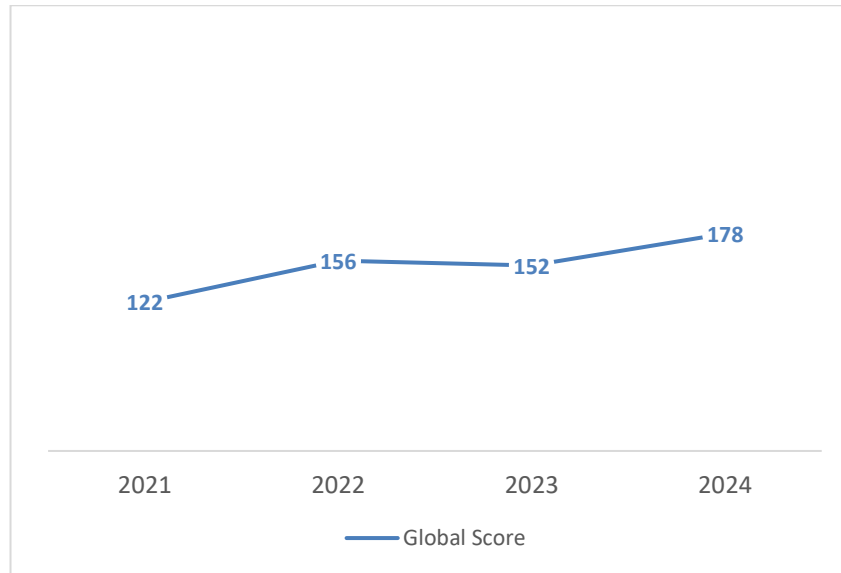
tersebut independen. Jurnalis sering menjadi sasaran bukan hanya karena isu yang mereka liput, tetapi juga karena mereka menentang norma sosial. Meskipun menghadapi risiko dan serangan teror yang signifikan, banyak jurnalis yang mapan dan bercita-cita tinggi tetap melanjutkan pekerjaan mereka di bidang ini (Gehrig dan Athena 2022).

## **2.2 Reaksi Taliban Terhadap Ancaman Narasi**

### *2.2.1 Kekerasan Terus Berlanjut Terhadap Media dan Jurnalis*

Setelah Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus 2021, lanskap media Afghanistan yang dulunya dinamis dan independen telah hancur di bawah kekuasaan Taliban. Banyak saluran televisi dan radio telah menghentikan operasinya, dan saluran yang masih beroperasi harus mematuhi peraturan dan sensor yang ketat. Banyak jurnalis yang beroperasi di dalam negeri melakukan sensor mandiri, dan mereka yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah Taliban atau para pemimpinnya telah menghadapi penganiayaan, pemenjaraan, dan penyiksaan. Reporters Without Borders (RSF) melaporkan bahwa setidaknya 50% media tutup karena tindakan keras Taliban dan krisis ekonomi yang parah di Afghanistan. Kebijakan Taliban yang membatasi telah menyebabkan posisi Afghanistan dalam peringkat kebebasan media internasional turun secara signifikan.

**Grafik 2.2 Indeks Kebebasan Pers**



Sumber: RSF (2021-2024)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sebelum pengambilalihan Taliban, Afghanistan telah naik ke peringkat 122 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers. Namun di bawah pemerintahan Taliban negara tersebut turun ke peringkat 152. Kemudian tahun 2024, sangat turun drastis di posisi 178 dari 180 negara. Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan drastis ini disebabkan oleh kebijakan media Taliban yang sangat ketat dan suasana ketakutan serta intimidasi terhadap komunitas media Afghanistan (Karimi 2024).

Kekerasan Taliban terhadap media dan jurnalis terus berlanjut tanpa henti di Afghanistan. Pada tahun 2021, AFJC melaporkan setidaknya 109 insiden, termasuk kematian delapan jurnalis dan pekerja media, serta penangkapan dan ancaman yang ditujukan terhadap jurnalis. Pada tahun 2022, tercatat total 260 pelanggaran yang meliputi ancaman, penahanan, dan bentrokan kekerasan, menandai peningkatan signifikan sebesar 138% dibandingkan dengan tahun 2021. Dari total insiden yang didokumentasikan pada tahun 2022, setidaknya 119 di antaranya melibatkan

penahanan sementara jurnalis yang berlangsung antara satu jam hingga beberapa hari, dan dalam beberapa kasus bahkan berbulan-bulan, sebagian besar disertai dengan kekerasan fisik dan psikologis serta penghinaan terhadap para tahanan (AFJC 2022).

Sekitar setengah dari 58 jurnalis yang ditangkap berada di Kabul, dengan 11 di Kandahar, 11 di Paktia, 7 di Ghazni, dan 6 di Faryab. Di provinsi Herat, Samangan, dan Bamiyan, masing-masing terjadi 3 insiden, sementara di provinsi Parwan, Uruzgan, Logar, dan Ghor, masing-masing tercatat 2 insiden. Selain itu, terdapat 1 insiden di masing-masing di provinsi Kapisa, Balkh, Takhar, Nangarhar, Khost, Helmand, Zabul, Farah, dan Badghis. Di antara jurnalis yang ditahan, terdapat setidaknya tiga orang, termasuk Khaled Qaderi mantan penyiar radio Nowruz di Herat ditangkap pada 17 Maret 2022, jurnalis Faizullah Faizbakhsh dari Kabul ditangkap pada 17 Agustus dan Qudratullah Tarar reporter Zarghun TV dari Khost ditangkap pada 11 November 2022. Khalid Qaderi dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh pengadilan Herat karena memposting pandangan kritisnya tentang Taliban di media sosial. Faizbakhsh ditangkap selama penembakan di lokasi di mana pemimpin al-Qaeda Ayman Zawahiri dibunuh di Kabul, sementara Tarar ditahan karena pekerjaannya sebagai jurnalis dan postingannya yang kritis di media sosial (AFJC 2022).

AFJC telah mencatat 128 insiden ancaman terhadap jurnalis dan media selama 12 bulan terakhir. Kurang dari setengah dari kasus ancaman ini 50 insiden dilaporkan di Kabul, dengan sembilan di Nangarhar, delapan di Faryab, dan tujuh di masing-masing provinsi Kapisa dan Kandahar. Selain penangkapan, terdapat setidaknya 11 insiden kekerasan fisik dan pemukulan terpisah pada tahun 2022, empat di antaranya terjadi di Kabul, dua di Badghis, dan masing-masing satu di

provinsi Balkh, Samangan, Takhar, Nangarhar, dan Zabul. Setidaknya dua insiden telah menyebabkan luka-luka pada jurnalis di Kabul (AFJC 2022).

Kemudian tahun 2023, AFJC mencatat setidaknya 168 kasus pelanggaran hak jurnalis, termasuk satu kematian dan 61 penangkapan. Meskipun jumlahnya menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022, namun tercatat ada delapan media yang dilarang pada tahun 2023. Lima di antaranya dilarang beroperasi sementara tiga lainnya tetap dilarang total (Faiez 2024).

Nai, sebuah organisasi pendukung media di Afghanistan mengumumkan bahwa insiden kekerasan terhadap jurnalis di Afghanistan meliputi penangkapan, penganiayaan, intimidasi, penghinaan, dan tindakan ilegal lainnya terhadap jurnalis oleh pasukan Taliban (Bhattacharya 2024). Pada 11 Maret 2023, saat para jurnalis berkumpul untuk memperingati Hari Jurnalis Nasional, Hossein Naderi seorang jurnalis dari Afghan Voice Agency tewas dalam serangan bom tersebut. Insiden ini menandai satu-satunya kasus dimana seorang jurnalis kehilangan nyawanya. Pada tanggal 10 Desember 2023, pengadilan Taliban di Provinsi Daykundi menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada Sultan-Ali Jawadi, redaktur Radio Nasim atas tuduhan bekerja sama dengan media asing, penistaan agama, dan spionase untuk orang asing (Bhattacharya 2024).

Pada tahun 2024, laporan UNAMA menyebutkan bahwa media terus melakukan sensor mandiri yang meluas karena takut akan pembalasan Taliban. Jurnalis terus ditangkap karena memberitakan berita yang dianggap melanggar peraturan Taliban. Misalnya, pada 10 Februari 2024 di Provinsi Samangan, Taliban menahan seorang jurnalis yang diduga meminta izin untuk mewawancarai pejabat Taliban terkait protes pemilik restoran dan hotel atas kenaikan pajak. Jurnalis tersebut tetap ditahan meskipun pejabat Taliban menolak untuk diwawancarai.

Selain itu, Taliban melarang media yang memiliki afiliasi politik, karena partai politik telah dilarang di Afghanistan. Akibatnya pada 16 April 2024, Taliban dan Komisi Pelanggaran Media memutuskan untuk menanggihkan Barya dan Noor TV karena diduga melanggar nilai-nilai nasional dan Islam. Kedua stasiun televisi tersebut berafiliasi dengan partai politik. Kemudian pada 7 Juni 2024, Kementerian Kehakiman Taliban mengumumkan bahwa Tamadon TV juga ditanggihkan karena diduga berafiliasi dengan partai politik (UNAMA 2024).

Salah satu bentuk represi Taliban yang paling sistematis adalah pembatasan aktivitas jurnalis perempuan. Pada tanggal 25 Februari 2024, Radio Azadi dan AFJC melaporkan bahwa otoritas Taliban di Khost telah melarang media lokal, termasuk stasiun radio dan saluran televisi untuk menerima panggilan telepon dari perempuan dan anak perempuan, yang secara efektif melarang penyiaran suara perempuan. Perintah ini dikeluarkan melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Informasi dan Kebudayaan Khost dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Khost, Abdul Rashid Omari. Selain larangan bagi media lokal untuk menerima panggilan dari perempuan dan anak perempuan di Khost, Zan Times melaporkan pada 29 Februari 2024 bahwa perempuan tidak lagi diizinkan bekerja sebagai penyiar radio di provinsi tersebut. Media tersebut juga melaporkan bahwa perempuan dilarang bekerja sebagai penyiar radio di provinsi Kandahar dan Ghor (Centre for Information Resilience 2024).

Kekerasan dan ancaman digunakan oleh Taliban untuk memaksa jurnalis mematuhi peraturan media yang secara tidak proporsional berdampak pada media independen, terutama yang menentang represi Taliban sejak awal. Mengingat ketidakhadiran undang-undang media yang jelas dan eksplisit, hampir semua bentuk pelaporan kritis dapat diinterpretasikan oleh Taliban sebagai alasan untuk

melakukan pembalasan (Moradi 2022).

### *2.2.2 Aturan Jurnalisme*

Afghanistan telah memiliki undang-undang yang mengatur media massa sejak konstitusi tahun 1964 dan undang-undang pers tahun 1965. Dengan kekalahan Taliban pada akhir tahun 2001, elemen-elemen demokrasi mulai diterapkan. Kemudian, pada tahun 2004 sebuah konstitusi baru disetujui oleh loya jirga untuk menjamin hak kebebasan berekspresi dan hak untuk mempublikasikan tanpa sensor. Undang-undang media disahkan pada bulan Maret 2002, April 2004, Juni 2006, dan Agustus 2008 (Peter Cary 2012).

Para jurnalis mengatakan bahwa adanya undang-undang baru yang disahkan pada 2008 sebagai sebuah kemajuan dari undang-undang sebelumnya, namun beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut masih mengkhawatirkan para jurnalis, seperti larangan untuk melakukan peliputan yang bertentangan dengan keamanan nasional. Meskipun adanya undang-undang yang seolah-olah melindungi kebebasan pers, pemerintah terus menggunakan elemen-elemen yang membatasi dari konstitusi dan undang-undang media, untuk melecehkan dan menghukum organisasi serta jurnalis. Pemerintah telah mengancam akan melarang program-program televisi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Afghanistan atau prinsip-prinsip Islam, yang memaksa media untuk menegaskan bahwa program mereka berlandaskan pada ajaran Islam (Peter Cary 2012).

Dalam pasal 34 Konstitusi Afghanistan menjamin kebebasan berekspresi dan secara tegas menyatakan: "Kebebasan berekspresi tidak boleh dilanggar. Setiap warga negara Afghanistan berhak untuk mengekspresikan pikiran melalui ucapan, tulisan, ilustrasi, dan cara lain sesuai dengan ketentuan konstitusi ini. Setiap warga negara Afghanistan berhak, sesuai dengan ketentuan hukum, untuk mencetak dan

menerbitkan berbagai subjek tanpa terlebih dahulu menyerahkannya kepada otoritas negara. Peraturan mengenai pers, radio, televisi, dan penerbitan serta media massa lainnya diatur oleh hukum."

Menurut laporan Freedom House tahun 2017, Afghanistan memiliki peringkat yang lebih baik dalam hal kebebasan berekspresi dibandingkan dengan semua negara tetangganya. Kriteria yang digunakan untuk perbandingan ini meliputi undang-undang media, dan undang-undang Afghanistan secara eksplisit menguraikan semua informasi dan prosedur yang diperlukan untuk pembentukan dan pemeliharaan sektor media. Undang-undang ini tidak memberi pemerintah sarana untuk mengendalikan media independen, itulah sebabnya undang-undang ini dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kawasan tersebut (Abdul Mujeeb Khalvatgar, t.t.).

Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus 2021, mereka mengumumkan penangguhan Konstitusi 2004 yang telah menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan hak-hak lainnya. Kemudian, Taliban telah mengeluarkan tiga peraturan yang meningkatkan kekhawatiran bagi media dan jurnalis. **Peraturan pertama** dikeluarkan pada tanggal 20 September 2021, yang terdiri dari 11 aturan jurnalisme. Taliban tidak membagikan peraturan ini secara terbuka di situs web mereka tetapi hanya dibagikan ke beberapa media saja dan peraturan tersebut diterbitkan dalam bahasa Pashtun. Aturan tersebut sebagai berikut:

1. Jurnalis dilarang memuat berita yang bertentangan dengan syariat Islam
2. Dilarang menghina tokoh nasional dalam kegiatan pers
3. Jurnalis harus menjauhi pelanggaran privasi negara dan pribadi
4. Media dan jurnalis dilarang mendistorsi isi berita

5. Jurnalis wajib mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik dalam penulisannya
6. Media diharapkan menjaga keseimbangan dalam penyiaran atau publikasi
7. Hal-hal yang belum diketahui keasliannya atau belum mendapat persetujuan dari instansi terkait harus lebih hati-hati
8. Hal-hal yang berdampak negatif terhadap opini publik atau merusak moral masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati saat disiarkan atau dipublikasikan
9. Media harus bersikap netral dalam menyampaikan berita dan mengutamakan penyebaran kebenaran.
10. *Government Media and Information Centre* (GMIC) mencoba bekerja sama dengan media dan jurnalis dan menyediakan fasilitas untuk menyiapkan laporan. Media akan menyiapkan laporan rinci dengan berkoordinasi melalui pusat ini.
11. Formulir khusus telah disiapkan di kantor media pemerintah untuk memfasilitasi penyusunan laporan sesuai dengan peraturan yang ada dan mulai sekarang media harus menyiapkan laporan rinci melalui koordinasi dengan *Government Media and Information Centre* (GMIC).

**Peraturan kedua** dikeluarkan pada tanggal 25 September 2021, yang terdiri dari enam aturan dan dibagikan hanya ke lima stasiun televisi, termasuk Tolonews dan One TV. Kelima aturan tersebut sebagian besar mencerminkan peraturan pertama. Namun, aturan keenam secara eksplisit mengamanatkan bahwa media massa harus merujuk kepada pemerintah Taliban dengan nama lengkapnya, "Emirat Islam Afghanistan," dan tidak menggunakan istilah seperti "kelompok" atau "jaringan" ketika membahas pemerintahan Taliban. Dalam konteks ini, aturan

keenam mengharuskan media massa untuk mengakui Taliban sebagai otoritas pemerintahan Afghanistan (Ehsan Qaane 2022).

**Peraturan ketiga** yaitu terkait peraturan agama yang semakin memperkuat penguasaan mereka terhadap media. Aturan ini dikeluarkan pada tanggal 21 November 2021, yang terdiri dari delapan aturan yang telah disebarluaskan secara luas di media sosial dan platform daring lainnya. Aturan ini berfokus pada pelarangan drama dan program hiburan yang terdiri atas:

1. Film yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan hukum Syariah di Afghanistan dilarang untuk dirilis
2. Film dalam negeri dan luar negeri yang merusak etika sosial dan budaya tidak boleh dipublikasikan
3. Program atau acara yang tidak sopan tidak boleh disiarkan
4. Acara yang melanggar standar Syariah dan martabat manusia harus dihindari
5. Film dan video yang menampilkan bagian tubuh pribadi tanpa penutup tidak boleh dipublikasikan
6. Perempuan diharuskan mengenakan jilbab Islami
7. Drama yang menampilkan aktor wanita tidak boleh dipublikasikan
8. Dilarang publikasi sinetron (film) yang menggambarkan wajah aktor yang memerankan Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad SAW.

Setiap peraturan telah dikeluarkan oleh badan terpisah dalam pemerintahan Taliban. Peraturan pertama dikeluarkan oleh kepala GMIC, Qari Yusuf Ahmadi; yang kedua dikeluarkan oleh juru bicara Taliban dan Wakil Menteri Informasi dan Kebudayaan, Zabiullah Mujahid; dan yang ketiga oleh Kementerian Kejahatan dan

Kebijakan Taliban. Tidak satu pun dari peraturan ini telah menerima dukungan dari kabinet sementara Taliban atau pemimpin tertinggi, (*Amir-ul Mumineen*) yaitu Mullah Hibatullah yang menunjukkan bahwa pemerintahan Taliban belum menjadi badan pembuat kebijakan yang kohesif (Ehsan Qaane 2022).

Peraturan yang dikeluarkan oleh Taliban mirip dengan peraturan media sebelumnya terdiri dari daftar larangan, termasuk Pasal 45 undang-undang media tahun 2009. Dalam peraturan kedua yang sebagian besar mencerminkan peraturan pertama, Mujahid memasukkan lima dari delapan larangan yang diuraikan dalam Pasal 45 dengan menghilangkan tiga aturan: 1) menghina agama lain; 2) menyerang karakter sosial korban kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan; dan 3) melanggar konstitusi, yang semuanya juga dikriminalisasi berdasarkan hukum pidana. Dalam pedoman ketiga, Kementerian Kejahatan dan Kebijakan menambahkan dua larangan baru yang berkaitan dengan perempuan, seperti yang dijelaskan sebelumnya (Ehsan Qaane 2022).

Langkah paling berani yang diambil Taliban dalam upaya mereka untuk mengatur media adalah pengumuman mereka untuk menegakkan Undang-Undang Media Massa Republik. Meskipun undang-undang ini mendukung beberapa pembatasan Taliban terhadap publikasi dan siaran media, undang-undang ini juga memberikan berbagai hak kepada jurnalis dan outlet media, termasuk hak atas perlindungan dan akses ke informasi. Namun, tiga peraturan Taliban tidak membahas masalah hak, yang menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Situasi ini telah membuat khawatir jurnalis karena peraturan media baru dari Taliban tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis, yang justru membuka jalan bagi penyensoran (Ehsan Qaane 2022).

### **2.3 Ketiadaan Demokrasi Dalam Perlindungan Media**

Di bawah kekuasaan Taliban, Afghanistan telah menduduki peringkat sebagai negara paling otoriter di dunia, menurut indeks demokrasi 2024 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Dengan skor hanya 0,25 dari 10, Afghanistan berada di peringkat ke 167 dari 167 negara, menjadikannya negara yang paling tidak demokratis di dunia untuk dua tahun berturut-turut. Sejak pengambilalihan Taliban pada tahun 2021, semua pemilihan umum telah dihapuskan, dan tidak ada mekanisme demokratis untuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Kebebasan seperti berbicara, berkumpul, beragama, dan hak-hak pribadi telah dibatasi secara ketat. Perempuan dan kaum minoritas telah menghadapi beberapa tindakan keras dengan larangan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik (Sirat 2025).

Indeks demokrasi menilai negara-negara berdasarkan proses pemilu, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Skor rendah Afghanistan dalam empat dari lima kategori ini menyoroti perjuangan berkelanjutan negara tersebut dalam hal tata kelola demokratis (Daryo 2025). Berikut adalah rincian indeks demokrasi Afghanistan:

1. Proses Pemilihan Umum dan Pluralisme (0.0). Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, pemilihan umum telah sepenuhnya ditiadakan, sehingga tidak ada ruang demokratis untuk partisipasi politik.
2. Kebebasan Sipil (0.0). Kebebasan dasar, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama, telah ditekan secara keras. Perempuan dan kelompok minoritas dilarang mengakses pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik.
3. Fungsi Pemerintahan (0.0). Kekuasaan tetap terpusat di tangan kepemimpinan Taliban, tanpa adanya oposisi atau transparansi dalam pemerintahan.

4. Partisipasi Politik (0.0). Ketidakhadiran partai politik, pemilihan umum, dan aktivisme sipil menyebabkan skor demokrasi yang terendah.
5. Budaya Politik (1.25). Aturan ideologis yang kaku dari Taliban dan penolakan mereka terhadap nilai-nilai demokratis menempatkan Afghanistan di peringkat terendah di antara negara-negara lain.

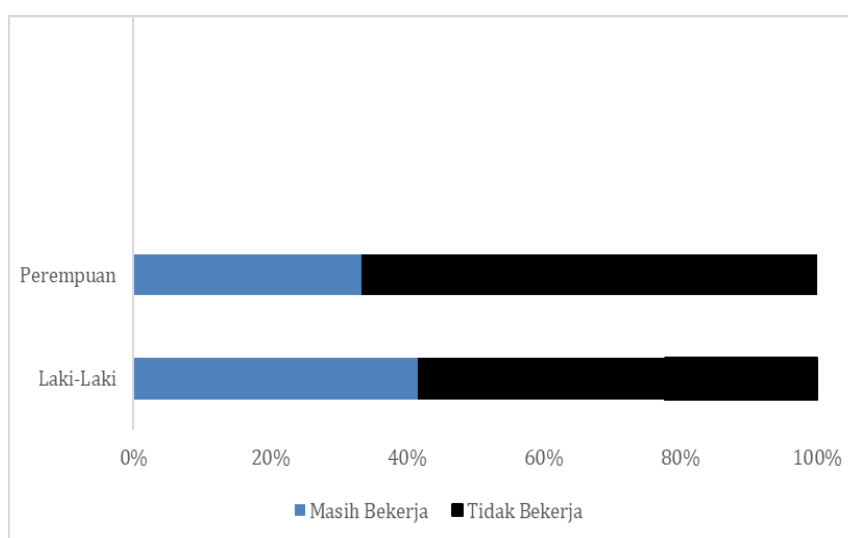
Di Afghanistan, para pemimpin Taliban memiliki otoritas politik yang tidak terbatas dan memerintah melalui dekrit tanpa konstitusi. Pemerintahan Taliban tidak diakui secara internasional. Beberapa undang-undang yang diwarisi dari era republik diterapkan secara selektif. Taliban telah menanggukkan semua hak politik dan hak sipil, membubarkan badan-badan perwakilan, dan melarang kritik terhadap rezim. Perempuan dan kelompok agama dan etnis minoritas menghadapi pembatasan kebebasan yang paling parah, sementara jurnalis dibatasi oleh peraturan yang keras dan ancaman kekerasan (Freedom House 2022).

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap jurnalis Afghanistan di bawah Taliban sangat luas dan sangat memprihatinkan. Rezim tersebut telah menggunakan berbagai taktik untuk menekan media, termasuk pengawasan terus-menerus, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan fisik, penghilangan paksa, dan pembunuhan yang ditargetkan. Pelanggaran ini telah menumbuhkan suasana ketakutan, di mana jurnalis beroperasi di bawah ancaman kekerasan dan penindasan yang terus-menerus (Mujtaba Haris 2024).

Menurut data RSF, di tujuh provinsi Afghanistan 60% media telah tutup sejak pengambilalihan Taliban. Di kota Herat bagian barat dan provinsi sekitarnya, hanya 18 dari 51 media yang masih beroperasi dan terjadi penurunan sebesar 65%. Wilayah Kabul tengah, yang memiliki lebih banyak media dibandingkan wilayah

lain, juga tidak luput dari pembantaian tersebut dengan penurunan 51%. Dari 148 yang dihitung sebelum 15 Agustus, hanya 72 yang masih beroperasi. Penutupan atau pengurangan aktivitas media berdampak besar terhadap lapangan kerja di sektor media. Pada awal bulan Agustus, dari 10,790 orang yang bekerja di media Afghanistan (8,290 laki- laki dan 2,490 perempuan) tersisa hanya 4,360 (3,950 laki- laki dan 410 perempuan).

**Gambar 2.1 Jurnalis Kehilangan Pekerjaan**



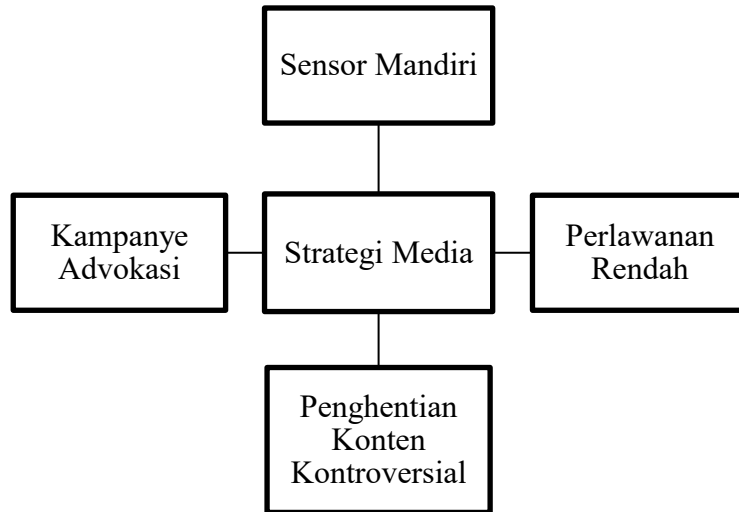
Sumber: Reporters Without Borders (2021)

Secara proporsional 84% perempuan lebih banyak terkena dampak kehilangan pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki hanya 52%. Saat ini, tidak ada jurnalis perempuan yang bekerja di 15 dari 34 provinsi di Afghanistan. Misalnya, di provinsi utara Jowzjan yang dulunya memiliki 19 media yang mempekerjakan 112 perempuan tidak satu pun dari 12 media yang masih beroperasi mempekerjakan perempuan. Taliban yang menguasai banyak daerah menerapkan persyaratan pada media lokal, termasuk tidak mempekerjakan jurnalis perempuan sama sekali. Lanskap media saat ini sebagian besar tidak memiliki jurnalis perempuan, bahkan di wilayah seperti Kabul yang biasanya memiliki lebih banyak jurnalis perempuan (Reporters Without Borders 2021b).

Selain itu, media di Afghanistan sebagian besar dikendalikan oleh partai politik, panglima perang, dan pengusaha, yang berusaha membentuk opini publik untuk tujuan politik mereka dan menyajikan citra yang lebih baik tentang urusan dan kegiatan politik kepada masyarakat. Pengaruh politik memiliki akar yang dalam yang dapat berdampak buruk pada kebebasan media. Partai politik dan tokoh-tokoh seringkali berupaya memanipulasi media swasta untuk keuntungan pribadi di tingkat nasional. Sebaliknya, pejabat pemerintah baik yang berpangkat tinggi maupun yang berpangkat rendah sering kali gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk menyediakan informasi yang tepat waktu kepada media. Jurnalis sering mengalami pelecehan, baik secara verbal maupun fisik, dan mereka menghadapi tindakan tidak menyenangkan dari staf pemerintah ketika mencari informasi (Jan Masomy 2022).

Ada beberapa strategi yang digunakan oleh media Afghanistan dalam menanggapi pengambilalihan media oleh Taliban dapat dikategorikan ke dalam empat pendekatan yaitu penyensoran diri, perlawanan tingkat rendah, penghentian konten kontroversial, dan kampanye advokasi.

### **Gambar Strategi Media dan Jurnalis Afghanistan**



Sumber: Human Rights Institute (2023)

Dalam menanggapi pengambilalihan media oleh Taliban, outlet media di Afghanistan menggunakan beberapa strategi yaitu penyensoran diri, perlawanan tingkat rendah, penghentian konten kontroversial, dan kampanye advokasi. Media dan jurnalis di Afghanistan telah melakukan sensor mandiri secara signifikan dalam meliput berita untuk mencegah ancaman dan serangan dari Taliban. Media yang berada di bawah kekuasaan Taliban melakukan sensor mandiri pada tiga tingkatan yaitu sensor mandiri dalam memilih topik dan narasumber berita, sensor mandiri terhadap jurnalis dalam meliput berita, dan sensor mandiri terhadap tim redaksi (Faisal Karimi 2023).

Tidak hanya itu, media dan jurnalis juga melakukan perlawanan rendah. Jika jurnalis dan outlet media menentang kebijakan media Taliban, maka mereka akan menghadapi serangan keras dari Taliban, nyawa mereka terancam, dan outlet media mereka ditutup. Sehingga, mobilisasi komunitas media untuk melawan kebijakan Taliban menghadapi hambatan dan kesulitan yang serius. Pemilik media dan jurnalis tidak melawan pemerintah Taliban karena kerentanan seperti tekanan keuangan, kondisi kerja yang tidak menentu, adanya kekosongan hukum dan

membahayakan nyawa mereka (Faisal Karimi 2023).

Untuk tetap aman dari penangkapan media oleh Taliban, beberapa media juga menghentikan konten hiburan dan musik. Media lokal dan nasional telah meningkatkan produksi dan penyiaran program keagamaan dan Islam melalui platform mereka. Selain itu, adanya strategi kampanye advokasi juga menjadi salah satu kegiatan dinamis dari lembaga-lembaga pendukung media dan jurnalis. Kegiatan advokasi yang dilakukan meliputi menarik perhatian internasional terhadap situasi media Afghanistan, upaya untuk membebaskan jurnalis yang dipenjara, meyakinkan Taliban untuk menghormati kebebasan media dan melakukan penelitian tentang jurnalisme di bawah pemerintahan Taliban. Adanya kampanye advokasi ini untuk menciptakan undang-undang dan peraturan khusus untuk mendukung media dan jurnalis di Afghanistan (Faisal Karimi 2023).

Pembatasan Taliban terhadap media dan konten media, dengan dalih hukum syariah, telah berdampak besar pada konten media selama dua tahun terakhir. Mereka telah melarang musik dan hiburan serta membatasi peran perempuan. Hal ini mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap konten media. Selain itu, dengan mengendalikan outlet media nasional dan sumber informasi, Taliban telah memaksa organisasi media untuk menyelaraskan konten mereka dengan ideologi mereka, yang secara efektif mengubahnya menjadi alat propaganda. Akibatnya, banyak media telah mengubah program dan konten mereka, dan terlibat dalam penyensoran mandiri untuk menghindari pembalasan dari Taliban. Hal ini telah menyebabkan penurunan liputan topik-topik sensitif. Meskipun internet dan media sosial telah menawarkan platform alternatif, penyensoran mandiri masih terus berlanjut. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini telah mengurangi keberagaman media dan membatasi kebebasan berekspresi di Afghanistan, yang mengakibatkan

lanskap media yang dicirikan oleh kesesuaian ideologis (Ahmad Zubair Jamshidi 2024).

## BAB 3

### ANALISIS TINDAKAN REPRESIF TALIBAN TERHADAP MEDIA DAN JURNALIS DI AFGHANISTAN

#### 3.1. Analisis Faktor *Dissent provokes* Dalam Tindakan Represif Taliban

*Dissent provokes* adalah *dissent provokes* adalah perbedaan pendapat politik yang mendorong aktor negara meresponnya dengan tindakan represif seperti merespon aksi pemogokan, demonstrasi, perang gerilya, terorisme dan perang saudara. Dalam hal ini, negara dapat memenuhi salah satu tujuan utamanya yaitu kontrol politik. Dalam konteks ini, semakin adanya perbedaan pendapat maka perilaku represif negara semakin meningkat untuk melakukan pemaksaan dan juga membuat tindakan negara sebagai tindakan hukum dan langkah-langkah ketertiban untuk mengurangi persepsi negatif (Davenport 2007, 39).

Media dan jurnalis seringkali mengalami ketidakamanan karena Afghanistan masih dalam kondisi perang yang mengerikan. Adanya *dissent* media terhadap Taliban dipengaruhi oleh beberapa isu seperti hak asasi manusia, kebebasan pers, korupsi dan kegiatan kelompok perlawanan. Dalam isu hak asasi manusia, media dan jurnalis sering mengkritik kebijakan Taliban yang membatasi partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan publik, interaksi mereka dengan laki-laki, dan kemampuan mereka untuk bekerja di luar rumah. Sebagai contoh, Rukhshana Media dan Zan Times mengkritik peraturan moral Taliban dengan menerbitkan laporan penyiksaan terhadap perempuan. Kemudian Taliban merespon kritik tersebut dengan pemukulan dan diinterogasi selama beberapa hari. Mereka menghadapi berbagai tantangan termasuk ancaman terhadap keselamatan, pembatasan kebebasan bergerak, dan penyensoran (Ifiran 2024). Tidak hanya itu,

media Hash-e-Subh dan Zawia Media ditutup karena melaporkan kasus pelanggaran HAM seperti penahanan warga sipil. Taliban secara langsung melanggar kebebasan media dengan menutup situs web dua surat kabar Afghanistan (RSF 2022).

Dalam isu kebebasan pers, media mengkritik Taliban karena membatasi kebebasan berekspresi, seperti adanya ancaman, sensor dan intimidasi terhadap jurnalis. Taliban tidak mengizinkan jurnalis manapun untuk meliput berita dari tempat kejadian perkara, ledakan, pencurian atau insiden lainnya. Jurnalis telah menjadi korban kekerasan dari pemerintah karena pelaporan mereka. Jurnalis diharuskan memastikan bahwa laporan mereka berimbang dan tidak memuat informasi yang belum diverifikasi dari pejabat atau isu yang dapat berdampak negatif terhadap sentimen publik.

Sebagai contoh, Tolonews menyiarkan berita tentang Taliban melarang serial drama asing, melarang program hiburan dan musik serta menutup siaran konten perempuan. Adanya kritik tersebut, presenter Tolonews Bahram Aman, koresponden Khpalwak Safi, dan penasihat hukum Nafay Khaleeq, ditangkap oleh pasukan keamanan Taliban di dalam kantor pusat media tersebut. Penangkapan Aman, Sapai, dan penasihat hukum TOLONews merupakan yang terbaru dari serangkaian serangan terhadap media Afghanistan. Penangkapan Aman, Sapai, dan penasihat hukum Tolonews menandai serangan terbaru terhadap media di Afghanistan. Penahanan Bahram Aman, Khaplwak Sapai, dan Nafay Khaleeq menjadi bukti tentang penindasan Taliban terhadap liputan kritis dan pengabaian terang-terangan terhadap kebebasan pers. IFJ mendesak Taliban untuk membiarkan media Afghanistan beroperasi secara independen dan segera menghentikan penahanan yang tidak adil terhadap jurnalis dan pekerja media (International

Federation of Journalists 2022).

Dalam isu korupsi, media mengkritik Taliban karena telah memanfaatkan bantuan kemanusiaan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Taliban telah mengalihkan dana yang semula dimaksudkan untuk meringankan sebagian dampak krisis kemanusiaan di Afghanistan pada Oktober 2021. Laporan 8am daily menyebutkan bahwa peningkatan korupsi di kalangan pejabat Taliban telah menjadi hal yang biasa, bahkan mereka yang menduduki posisi atau wewenang yang minim, memperkaya diri mereka sendiri melalui sumber daya yang mereka miliki. Mulai dari menteri hingga pejabat lokal di tingkat provinsi dan kabupaten, korupsi tampaknya semakin merajalela dan meningkat. Saat ini, korupsi telah meningkat sebesar 80 hingga 90 persen (Mohammad 2024). Media Hash-e-Subh Afghanistan melaporkan bahwa perekrutan paksa di dalam organisasi non-pemerintah telah mampu mengalihkan dan menyalahgunakan dana tersebut. Media yang melaporkan hal ini diancam dengan kekerasan oleh pemerintah Taliban dan beberapa jurnalisnya ditahan (Jessica Ludwig dan Albert Torres 2024).

Saat ini di bawah pemerintahan Taliban mereka telah membatasi seluruh aktivitas media dengan menerapkan strategi yang menggabungkan dua pendekatan pada periode pemerintah dan pemberontak dengan menerapkan aturan yang sesuai dengan hukum Syariah Islam. Saat ini, media dan jurnalis semakin menjadi sasaran pengawasan ekstrem, intimidasi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, kekerasan fisik, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar hukum (Faisal Karimi 2023).

Dalam konteks pengawasan, Taliban secara ketat memantau jurnalis independen yang terus beroperasi di Afghanistan hingga saat ini, memeriksa pekerjaan dan pergerakan mereka dengan ketat. Sejak Agustus 2021, personel

Taliban telah memanggil, menghentikan, memeriksa, dan menginterogasi jurnalis secara acak, serta merazia dan menggeledah rumah dan kantor mereka. Misalnya, pada Oktober 2021, seorang jurnalis dari Provinsi Kunar dituduh menerbitkan propaganda anti-jihad. Jurnalis tersebut memberitahu DW News bahwa orang-orang bersenjata datang ke rumah ayahnya, menanyakan tentang dirinya, dengan alasan bahwa mereka memiliki urusan dengannya, karena ia kadang-kadang bekerja sama dengan jurnalis asing dan mereka menuduhnya telah menerbitkan propaganda anti-jihad. Sejak insiden tersebut, jurnalis tersebut menyembunyikan keberadaannya (Moradi 2022).

Dalam konteks intimidasi, Taliban menggunakan taktik intimidasi untuk menekan pelaporan independen. Sejak Agustus 2021, pejabat Taliban secara berkala mengunjungi, menelepon, dan mengancam media berita independen. Mereka memperingatkan editor, jurnalis, dan penyiar untuk tidak mempublikasikan konten apapun yang mengkritik Taliban. Pejabat mengeluarkan peringatan fisik dengan mengunjungi rumah dan kantor staf media, serta secara digital dengan mengirim pesan teks atau menelepon. GDI mengancam akan mencabut lisensi operasional media dan mengancam akan menangkap semua stafnya jika ada konten yang diproduksi yang mengkritik Taliban.

Kasus Jibrán Lawrand, seorang pembawa acara di Kabul News, menjadi contoh penggunaan taktik intimidasi untuk membungkam suara-suara yang kritis. Pada 25 April 2022, Lawrand dipanggil ke GDI, dimana ia ditahan, diinterogasi, dan dihina secara verbal. Insiden ini terjadi karena ketidaksetujuannya dengan seorang pendukung Taliban selama program televisi yang ia pandu. GDI memperingatkan Lawrand bahwa acaranya tidak boleh mengkritik Taliban atau menampilkan analisis yang kritis terhadap rezim. Mereka juga memperingatkannya

untuk tidak mengungkapkan detail penahanan dan interogasinya kepada media, dengan ancaman konsekuensi yang lebih berat. Lawrand terus menerima ancaman dari nomor telepon yang tidak dikenal. Situasi ini akhirnya membuat Lawrand memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari bidang jurnalisme (Moradi 2022).

Kemudian media dan jurnalis yang ditahan oleh Taliban karena mereka sering melaporkan bahwa mereka menjadi sasaran pemukulan, penyiksaan, dan berbagai bentuk kekerasan fisik. Kekerasan ini dimaksudkan untuk mematahkan keinginan jurnalis dan memaksa mereka untuk patuh terhadap kebijakan Taliban. Penggunaan kekerasan fisik merupakan strategi yang disengaja oleh Taliban untuk mempertahankan kendali atas media dan memastikan bahwa tidak ada suara yang berbeda pendapat yang didengar. Sehingga, banyak insiden telah dilaporkan terkait pelanggaran hak jurnalis, dengan 366 kasus yang terjadi antara Agustus 2021-2023 (AFJC 2021). Dalam hal ini, Taliban merespon berbagai kritik media dengan represi karena bagian dari strategi mereka untuk melegitimasi kekuasaannya dan mengendalikan narasi di media, seperti mengeluarkan pembatasan media, pembatasan terhadap jurnalis perempuan, penyensoran, tindakan kekerasan terhadap media dan jurnalis, pelarangan musik, monopoli informasi, penuntutan jurnalis dan pembentukan media yang dikendalikan oleh Taliban. Sehingga media dan jurnalis di Afghanistan telah menghadapi hambatan dan pelanggaran yang signifikan terhadap hak-hak dasar dan perlindungan hukum yang secara signifikan membatasi kebebasan dan independensi mereka.

Oleh karena itu, semakin adanya *dissent provokes* maka perilaku represif negara semakin meningkat untuk melakukan pemaksaan. Dalam hal ini, semakin adanya dissent media dalam menyuarakan kebenaran maka respon taliban semakin represif untuk mengendalikan media tersebut. Adanya dissent media terhadap

Taliban ini disebabkan karena adanya regulasi ketat terhadap media dan pembatasan kebebasan pers yang dilakukan Taliban untuk mengendalikan narasi dalam negeri.

### **3.2 Analisis Faktor *Repression persists* Dalam Tindakan Represif Taliban**

*Repression persists* adalah represi yang terus dilakukan untuk menjaga kekuasaan bahkan tanpa adanya kritik yang membuat para pemimpin politik menggunakan tindakan represif, sehingga mengurangi ketidakpastian (Davenport 2007, 40).

Sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021, tindakan represi masih terjadi dimana rezim otoriter ini telah merumuskan serangkaian pembatasan yang ketat dan disengaja terhadap aktivitas media dan jurnalis di Afghanistan untuk melegitimasi kekuasaannya dan mengendalikan narasi di media. Dalam hal ini, *repression persists* yang dilakukan pemerintah Taliban yaitu menggunakan kekuatan regulasi secara signifikan untuk mengganggu kebebasan media dan kebebasan berekspresi. Taliban telah mengeluarkan serangkaian pembatasan formal dan informal yang harus dipatuhi oleh media dan jurnalis. Selain itu, Taliban telah mengabaikan undang-undang dan peraturan media sebelumnya yang menjamin kebebasan pers. Tidak ada undang-undang khusus yang berlaku untuk melindungi dan mendukung hak-hak media dan jurnalis di Afghanistan.

Taliban telah memberlakukan pembatasan pada aktivitas media dan jurnalis, termasuk 11 aturan jurnalisme, perintah yang terdiri dari delapan artikel untuk stasiun televisi, dan beberapa arahan lisan yang dikeluarkan oleh badan terpisah dalam pemerintahan Taliban yang terdiri kepala GMIC, juru bicara Taliban dan Wakil Menteri Informasi dan Kebudayaan, dan Kementerian Kebajikan dan Kejahatan.

**Dalam peraturan pertama,** terdapat 11 aturan jurnalisme yang dikeluarkan oleh kepala GMIC. Peraturan ini mencerminkan interpretasi Taliban terhadap doktrin Islam mengenai Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Aturan 1-3 yaitu melarang jurnalis untuk menyiarkan atau menerbitkan berita yang bertentangan dengan Islam, menghina tokoh nasional atau melanggar privasi pada undang-undang media nasional Afghanistan yang ada. Tidak adanya persyaratan dalam peraturan baru ini membuka pintu bagi penyensoran dan penindasan, karena tidak ada indikasi mengenai siapa yang menentukan dan atas dasar apa ditentukan.

Aturan 4-6 yaitu memerintahkan jurnalis untuk mematuhi prinsip jurnalistik. Mereka tidak boleh mencoba mendistorsi isi berita, mereka harus menghormati prinsip-prinsip jurnalistik dan mereka harus memastikan bahwa pelaporan mereka seimbang. Namun tidak adanya referensi terhadap norma-norma internasional yang diakui menunjukkan bahwa peraturan tersebut juga dapat disalahgunakan atau ditafsirkan secara sewenang-wenang. Aturan 7-8 yaitu hal-hal yang belum dikonfirmasi oleh pejabat pada saat siaran atau publikasi harus ditangani dengan hati-hati dan bahwa hal-hal yang dapat berdampak negatif pada sikap masyarakat atau mempengaruhi moral harus ditangani dengan hati-hati ketika disiarkan atau diterbitkan. Hal ini membuat kembalinya kendali berita yang belum ada di Afghanistan selama 20 tahun terakhir.

Aturan 9 yaitu mewajibkan media untuk mematuhi prinsip netralitas terhadap apa yang mereka sebar dan hanya mempublikasikan kebenaran. Dalam aturan ini dapat menimbulkan beragam penafsiran dan semakin membuat jurnalis rentan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dan aturan 10-11 yaitu aturan yang berbahaya yang menyensor informasi, publikasi dan penyiaran. Aturan ini mengharuskan berita selaras dengan ideologi Taliban dan produksi menekankan

bahwa isu-isu yang tidak dikonfirmasi oleh Taliban tidak boleh dipublikasikan. Outlet media juga diharuskan untuk menyiapkan laporan terperinci mereka dengan koordinasi GMIC, menggunakan formulir yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Sehingga peraturan ini masih belum jelas sehingga berisiko terhadap keselamatan jurnalis jika mereka melanggar peraturan ini.

**Dalam peraturan kedua**, memaksa media untuk mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan dengan sebutan “Emirat Islam Afghanistan” dan tidak menggunakan istilah seperti "kelompok" atau "jaringan" ketika membahas pemerintahan Taliban. **Dalam peraturan ketiga**, terdapat aturan yang ditujukan untuk pertama kalinya sejak mereka kembali berkuasa, seperti Taliban memberlakukan pembatasan terhadap perempuan di media, mewajibkan mereka untuk mengenakan jilbab islami di saluran TV dan melarang penyiaran yang dibintangi oleh perempuan. Peraturan ini telah diberlakukan secara ketat pada siaran di Balkh dan Takhar. Stasiun radio di beberapa provinsi juga diwajibkan untuk mengganti program berita dan musik dengan konten keagamaan, yang mengakibatkan beberapa stasiun radio lokal akhirnya menghentikan semua siaran.

Sejak saat itu, rezim tersebut telah berulang kali memperingatkan jurnalis dan pekerja media di Afghanistan agar tidak menerbitkan atau menyiarkan konten apa pun yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan nasional. Hal ini berdampak buruk, karena organisasi media dan jurnalis terpaksa melakukan penyensoran mandiri secara ekstensif untuk menghindari potensi pembalasan. Adanya aturan formal dan informal yang diterapkan Taliban juga sangat membatasi media di Afghanistan. Media dan jurnalis di Afghanistan mengalami berbagai jenis penyensoran termasuk sensor langsung, sensor tidak langsung, dan sensor mandiri. Taliban mengancam direktur media setiap hari,

memperingatkan mereka untuk menyensor konten mereka sesuai dengan kebijakan Taliban. Semua media yang beroperasi di Afghanistan berada di bawah tekanan rezim yang berkuasa dan menghadapi penyensoran.

Media menerima peringatan dan ancaman langsung dan tidak langsung dari Taliban. Sebagai contoh, direktur kantor berita menyatakan: “Penyensoran langsung telah diberlakukan kepada kami oleh Taliban. Dari pengaktifan pemancar siaran hingga pemilihan presenter, nada yang digunakan, isi siaran, dan pilihan topik laporan, semuanya dipengaruhi oleh Taliban. Selama persiapan laporan kami, tentara Taliban berdiri di belakang kamera, mengamati rekaman video kami. Ketika kami melakukan wawancara dengan Taliban, mereka mendengarkan rekaman dan memerintahkan kami untuk mengedit atau menghapus segmen tertentu.” Tidak hanya itu, seorang jurnalis yang bekerja di sebuah stasiun televisi berita nasional terkemuka di Kabul menyatakan, "Para pejuang Taliban hadir di kantor-kantor stasiun televisi di Kabul dengan dalih untuk memastikan keamanan media. Mereka memantau semuanya secara langsung, dan bahkan sebelum dipublikasikan, kami diharuskan untuk menyerahkan laporan berita terkait keamanan kepada Taliban untuk ditinjau dan disiarkan hanya setelah mendapat persetujuan mereka." (Faisal Karimi 2023).

Status hukum peraturan Taliban, termasuk tiga peraturan untuk media tidak jelas. Taliban belum menetapkan sistem hukum, badan legislatif, atau prosedur legislasi untuk menerbitkan dokumen hukum. Meskipun beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh Pemimpin Tertinggi Taliban, kabinet eksekutif, berbagai kementerian, juru bicara, dan bahkan otoritas provinsi, kedudukan hukumnya tidak pasti. Peraturan ini terlihat sebagai rekomendasi daripada dokumen hukum yang mengikat. Hampir semua peraturan melarang tindakan tertentu tetapi tidak

menentukan konsekuensi apapun bagi mereka yang melanggarnya (Ehsan Qaane 2022).

Media di Afghanistan telah mengalami transformasi dramatis sejak Taliban kembali berkuasa, dengan jurnalisme yang objektif dan independen secara efektif dihapuskan karena maraknya penyensoran mandiri. Taliban secara sistematis telah memberlakukan rezim kontrol media yang membungkam perbedaan pendapat, menekan kebebasan berekspresi, dan memastikan bahwa narasi publik selaras dengan perspektif ideologis mereka. Serangan terhadap kebebasan pers ini memiliki implikasi yang mendalam bagi rakyat Afghanistan, karena media yang independen dan bebas memainkan peran penting dalam menyediakan informasi komprehensif mengenai keputusan dan peristiwa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat meningkatkan kebutuhan akan media tanpa sensor yang dapat mengungkap kesalahan, memperkuat suara-suara terpinggirkan, dan berfungsi sebagai pengawas terhadap otoritas rezim baru.

Oleh karena itu, tindakan pemaksaan yang masih berlanjut mengurangi ketidakpastian. Dalam hal ini, adanya *repression persist* yang dilakukan Taliban sejak kembali berkuasa dengan menerapkan tiga peraturan yang membatasi media menunjukkan peraturan jurnalisme yang berbahaya tersebut membuka jalan bagi penyensoran dan penganiayaan, serta merampas independensi jurnalis. Pendekatan Taliban terhadap kontrol media ditandai dengan pelecehan, penyerangan, dan penahanan jurnalis yang mencerminkan keinginan untuk pengawasan ketat daripada mendorong kebebasan pers. Taliban menghapus sistem hukum 2004 dan menggantikannya terhadap interpretasi hukum syariah yang sangat ketat sehingga tidak adanya kerangka hukum yang jelas yang mendukung kebijakan di bidang ini,

telah mengakibatkan peraturan Taliban untuk media ditegakkan secara berbeda di berbagai provinsi dan distrik di Afghanistan.

### **3.3 Analisis Faktor *Democracies pacify* Dalam Tindakan Represif Taliban**

*Democracies pacify* adalah kondisi demokratisasi yang cenderung mengurangi paksaan negara terhadap represi yang terus berlangsung sepanjang waktu. Demokrasi menciptakan kondisi damai apabila adanya akuntabilitas pemimpin politik. Dalam hal ini apabila tingkat demokrasi tidak mencapai level tertentu dalam beberapa waktu maka tidak akan bisa mengurangi perilaku represif (Davenport 2007, 41).

Tingkat demokrasi yang tidak mencapai level tertentu di Afghanistan tidak akan bisa mengurangi tindakan represif Taliban. Ketiadaan demokrasi di bawah pemerintah Taliban ditandai dengan tidak adanya mekanisme akuntabilitas. Jurnalis Afghanistan sering mendesak pemerintah Taliban untuk menyelidiki insiden kekerasan terhadap jurnalis dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku di pengadilan. Alih-alih melakukan penyelidikan dan menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku, pemimpin Taliban justru telah mengadopsi strategi penyangkalan, secara konsisten menolak keluhan dan bukti pelanggaran sebagai berita palsu atau rumor yang tidak berdasar. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan berada di bawah kendali ideologi Taliban bukan sebagai hukum positif.

Situasi pelanggaran terhadap jurnalis juga terjadi tanpa penyelidikan dan pertanggungjawaban, seringkali dengan impunitas yang hampir total. Seperti yang diungkapkan oleh seorang jurnalis Afghanistan dari Provinsi Baghlan bahwa Taliban berusaha untuk menghilangkan semua media agar komunitas internasional tidak mengetahui tindakan mereka. Satu-satunya kelompok yang bertindak

melawan Taliban adalah jurnalis, karena mereka memantau, melaporkan, dan mempublikasikan perilaku dan kinerja Taliban. Taliban juga secara diam-diam mengancam, menyiksa, dan dalam beberapa kasus, menghilangkan jurnalis, namun tidak ada yang mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Saat ini, puluhan jurnalis ditahan di Kabul dan provinsi lain, namun keluarga mereka tetap tidak mengetahui nasib mereka (Moradi 2022).

Selain itu, Taliban juga telah memberlakukan pembatasan pada arus informasi, yang telah menjadi strategi utama mereka untuk mendominasi lanskap media dan memonopoli informasi di Afghanistan. Sebagai langkah awal, Taliban membatalkan undang-undang akses informasi pemerintah sebelumnya dan peraturan media lainnya, yang secara signifikan membatasi akses informasi bagi warga negara dan jurnalis. Kurangnya akses informasi merupakan masalah utama bagi media dan jurnalis Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban, yang mengakibatkan penyebaran misinformasi dan disinformasi yang meluas dalam ekosistem informasi Afghanistan.

Kontrol Taliban atas produksi berita merusak kebebasan pers dan penyebaran berita yang tepat waktu di Afghanistan. Jurnalis kehilangan independensi dan menghadapi penundaan, karena mereka harus mendapatkan persetujuan Taliban sebelum menerbitkan berita. Secara teratur Taliban menggunakan taktik intimidasi untuk membungkam suara-suara yang berbeda pendapat di media. Jurnalis menerima peringatan dalam bentuk surat ancaman, panggilan telepon, atau kunjungan langsung dari anggota Taliban. Ancaman-ancaman ini terutama ditujukan kepada mereka yang melaporkan isu-isu sensitif seperti hak-hak perempuan, korupsi dalam jajaran Taliban, atau kegiatan kelompok-kelompok perlawanan. Ketakutan yang ditimbulkan oleh ancaman-

ancaman ini menyebabkan banyak jurnalis melakukan penyensoran diri bahkan meninggalkan profesi mereka sepenuhnya.

Selama dua dekade terakhir, intervensi pemerintah telah menimbulkan tantangan yang signifikan bagi lanskap media di Afghanistan. Kurangnya lembaga yang mapan dan peraturan khusus yang mengatur media telah menciptakan kondisi bagi Taliban untuk memaksakan kebijakan mereka melalui serangkaian keputusan. Keputusan-keputusan ini termasuk larangan musik, pembatasan kritik terhadap pemerintah dan pejabatnya, pembatasan program hiburan, dan pembatasan terhadap jurnalis perempuan. Lingkungan peraturan ini tidak hanya menghambat jurnalisme independen tetapi juga memperkuat kendali Taliban atas narasi dan arus informasi di Afghanistan, sehingga semakin mempersulit suara-suara alternatif untuk didengar dan informasi yang akurat untuk disebarluaskan.

Adanya kekosongan hukum di Afghanistan juga membuat para direktur media menciptakan mekanisme pengaturan mandiri untuk mencegah kemungkinan ancaman dari pemerintah Taliban dengan kemungkinan tantangan dan kekhawatirannya. Mereka melakukan strategi sensor mandiri, perlawanan tingkat rendah, menghentikan program musik dan hiburan, serta melakukan kampanye advokasi itu karena Taliban memaksa para media untuk mengabaikan kebijakan media mereka sendiri dan menyesuaikan program-program mereka sesuai dengan kebijakan dan aturan Taliban. Sebagai contoh, pemimpin redaksi sebuah stasiun radio lokal di provinsi selatan Kandahar menyatakan: *“We cannot publish many issues. We cannot cover the issues of women, youth, children, and the disabled too much. We completely stopped playing music and critical news. Because we are afraid of facing a bad reaction from the Taliban.”* (Faisal Karimi 2023).

Media dan jurnalis di Afghanistan menghadapi tantangan yang signifikan dalam menavigasi khususnya dalam melawan taktik pengambilalihan media yang digunakan oleh Taliban. Kapasitas komunitas media Afghanistan untuk memobilisasi melawan berbagai strategi media Taliban sangat terbatas. Hal ini ditandai karena adanya keterbatasan struktural seperti sensor dan pembatasan hukum. Implikasi dari peraturan media baru yang diperkenalkan oleh Taliban pada September 2024 sangat luas, karena mereka menciptakan lingkungan di mana setiap bentuk perbedaan pendapat dengan cepat ditekan, sehingga hanya sedikit ruang berekspresi (Sahibzada M. Usman 2024).

Kebijakan ketat dan pengawasan yang diterapkan oleh Taliban terhadap aktivitas media telah secara signifikan mengurangi kemungkinan tercapainya kebebasan pers yang sejati, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap hak-hak dasar dan aspirasi demokratis rakyat Afghanistan. Penurunan kebebasan pers mewakili kemunduran yang signifikan bagi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan warganya. Kebebasan berekspresi seharusnya memfasilitasi aliran informasi yang tidak terhalang, bukan dibatasi oleh apa yang dianggap dapat diterima oleh otoritas. Tidak hanya itu, demi transparansi dan akuntabilitas seharusnya media bisa melaporkan pejabat publik dan kebijakan negara tanpa rasa takut atau campur tangan (Mujtaba Haris 2024).

Oleh karena itu, tingkat demokrasi yang tidak mencapai level tertentu dalam beberapa waktu maka tidak akan bisa mengurangi perilaku represif. Dalam hal ini, demokrasi yang tidak mencapai level di Afghanistan seperti tidak adanya kebebasan pers membuat Taliban melakukan tindakan represif untuk mengontrol narasi publik. Media dalam pemerintahan yang demokratis memiliki peran untuk meminta pertanggungjawaban kepada otoritas demokratis tetapi negara tidak

mampu melindungi jurnalis dari kekuasaan informal dan kekerasan politik. Adanya kekosongan hukum di Afghanistan juga membuat tantangan terus berlanjut terhadap media dan jurnalis yang menciptakan penurunan kebebasan pers. Alasan dibalik tantangan ini adalah konflik bersenjata selama dua dekade, korupsi yang terjadi di pemerintahan, perilaku penindasan dari individu, aparat pemerintah dan panglima perang terhadap jurnalis dan tidak dilaksanakannya hukum dan konstitusi terhadap media dan jurnalis. Demokrasi menciptakan kondisi damai apabila adanya akuntabilitas pemimpin politik. Namun, di bawah rezim Taliban, tidak ada laporan resmi yang tersedia mengenai alasan penangguhan media tersebut. Sehingga, media dan jurnalis Afghanistan belum berhasil mengurangi atau menghentikan upaya penguasaan media oleh pemerintah Taliban. Sejauh ini, mereka harus tunduk pada strategi pengambilalihan Taliban dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sejak jatuhnya Afghanistan, Taliban berhasil mengambil ahli kekuasaan pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan perubahan besar di berbagai sektor, termasuk media. Tindakan represif yang dilakukan Taliban telah mengubah lanskap media di Afghanistan. Lanskap media di Afghanistan telah mengalami transformasi signifikan setelah pengambilalihan Taliban, yang mengakibatkan implikasi terhadap penyebaran informasi, kebebasan berekspresi, dan peran jurnalisisme. Taliban menggunakan kebijakan represif untuk membentuk sistem kebebasan media di bawah kendalinya yang terlihat dalam penguasaan mereka di waktu singkat. Dengan menciptakan lingkungan pengawasan yang tidak hanya sangat membatasi kebebasan media tetapi juga menekan dan mengintimidasi media dan jurnalis dengan berbagai cara. Di bawah rezim Taliban, jurnalis Afghanistan dihadapkan pada lingkungan yang penuh dengan ketakutan dan penindasan. Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan *mengapa pemerintah Taliban menggunakan kebijakan represif terhadap media dan jurnalis di wilayah konflik Afghanistan* dengan menggunakan teori *state repression* oleh Christian Davenport mengenai tiga faktor penjelas yang mendorong perilaku represif yaitu *dissent provokes*, *repression persists*, dan *democracies pacify*

Kebijakan represif Taliban telah menumbuhkan suasana penyensoran diri yang meluas, di mana beberapa media yang masih beroperasi di bawah ancaman kekerasan, penangkapan, dan pemenjaraan. Setelah dianalisis menggunakan tiga

faktor penjelas yang mendorong tindakan represif Taliban, penulis menemukan bahwasanya adanya *dissent* media terhadap Taliban karena mereka mengkritik kebijakan hak asasi manusia, kebebasan pers, korupsi dan kegiatan kelompok perlawanan yang terus terjadi di Afghanistan. Hal ini yang kemudian membuat Taliban melakukan kontrol yang ketat terhadap media. Sehingga, *repression persist* yang dilakukan Taliban sejak kembali berkuasa semakin diperketat dengan menerapkan tiga peraturan yang membatasi media yang menunjukkan peraturan jurnalisme yang berbahaya tersebut membuka jalan bagi penyensoran dan penganiayaan, serta merampas independensi jurnalis. Kemudian, *democracies pacify* yang tidak mencapai levelnya seperti tidak adanya kebebasan pers dan adanya kekosongan hukum membuat Taliban mengambil alih kekuasaan dan juga menerapkan hukum mereka sendiri seperti hukum syariah dan mengabaikan hukum nasional. Sehingga, sulit untuk mengurangi tindakan represif Taliban karena tidak mencapai level demokrasi tersebut. Berikut ini hasil analisis studi kasus dengan menggunakan tiga faktor penjelas yang mendorong tindakan represif Taliban yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Hasil Analisis Studi Kasus**

<b>Faktor Penjelas</b>	<b>Definisi oleh Davenport</b>	<b>Hasil Analisis</b>
<i>Dissent provokes</i>	Adanya perbedaan pendapat meningkatkan perilaku represif negara untuk melakukan pemaksaan	Adanya <i>dissent</i> media terhadap Taliban karena mengkritik kebijakan HAM, kebebasan pers, dan korupsi yang terus terjadi di Afghanistan. Sehingga, Taliban mengendalikan narasi dalam negeri dengan regulasi

		ketat terhadap media dan jurnalis
<i>Repression persists</i>	Represi yang terus dilakukan untuk menjaga kekuasaan bahkan tanpa adanya kritik yang membuat para pemimpin politik menggunakan tindakan represif, sehingga mengurangi ketidakpastian	Taliban menerapkan tiga peraturan yang membatasi media. Pendekatan Taliban terhadap kontrol media ditandai dengan kekerasan, pelecehan, penyerangan, dan penahanan jurnalis yang mencerminkan keinginan pengawasan ketat. Tidak ada undang-undang khusus yang berlaku untuk melindungi dan mendukung hak-hak media dan jurnalis di Afghanistan
<i>Democracies pacify</i>	Kondisi demokratisasi yang cenderung mengurangi paksaan negara terhadap represi yang terus berlangsung sepanjang waktu. Demokrasi yang tidak mencapai level dalam beberapa waktu maka tidak akan bisa mengurangi perilaku represi	Demokrasi di Afghanistan tidak mencapai level seperti tidak adanya kebebasan pers. Kondisi ini ditandai dengan kurangnya lembaga yang mapan dan peraturan khusus yang mengatur media membuat tantangan terus berlanjut terhadap media dan jurnalis

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Media dan jurnalis di Afghanistan menghadapi tantangan yang signifikan dalam menavigasi khususnya dalam melawan taktik pengambilalihan media yang digunakan oleh Taliban. Meskipun menghadapi ancaman terhadap keselamatan pribadi, penyensoran, dan kesulitan ekonomi, mereka terus memainkan peran penting sebagai pengawas dan pembawa berita di Afghanistan yang berubah dengan cepat. Dedikasi mereka untuk menegakkan prinsip-prinsip jurnalisme dan kebebasan berekspresi tetap menjadi kekuatan penting dalam menghadapi kesulitan.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penelitian ini terbatas pada bagaimana kebijakan represif Taliban terhadap media dan jurnalis di Afghanistan tahun 2021-2023. Oleh karena itu, untuk penelitian lebih lanjut, penulis merekomendasikan untuk melihat bagaimana upaya media dan jurnalis bisa beradaptasi dalam pekerjaannya di bawah kebijakan penangkapan media digital Taliban dan bagaimana peran komunitas internasional dalam melindungi hak kebebasan berekspresi bagi jurnalis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujeeb Khalvatgar. t.t. "Afghanistan." Media Landscapes.
- AFJC. 2021. "AFJC Documents 366 Violations of Media Freedoms in Afghanistan during Two Years of Taliban Rule."
- AFJC. 2022. "AFJC: 260 Violations of Media Freedom in Afghanistan during 2022." Afghanistan Journalists Center. <https://afjc.media/english/index.php/news/annual-report/afjc-260-violations-of-media-freedom-in-afghanistan-during-2022>.
- Ahmad Zubair Jamshidi. 2024. "Expatriate Afghan Media and Local Media amidst Taliban Constraints," Februari. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10679012>.
- BBC. 2023. "A survey of media consumption in Afghanistan."
- Bhattacharya, Sanchita. 2024. "Afghanistan: Abusing The Media – Analysis." Eurasiareview.com. <https://www.eurasiareview.com/23042024-afghanistan-abusing-the-media-analysis/>.
- Bilal Guler. 2021. "Kabul women's rights protest turns violent." <https://www.dw.com/en/afghanistan-womens-rights-protest-turns-violent/a-59085102>.
- Committee to Protect Journalists. t.t. "51 Journalists Killed in Afghanistan." [https://cpj.org/data/killed/2020/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&cc\\_fips%5B%5D=AF&start\\_year=2001&end\\_year=2020&group\\_by=location](https://cpj.org/data/killed/2020/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&cc_fips%5B%5D=AF&start_year=2001&end_year=2020&group_by=location).
- Committee to Protect Journalists. 2024. "66 Journalists Killed in Afghanistan." Committee to Protect Journalists. [https://cpj.org/data/killed/2024/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start\\_year=2024&end\\_year=2024&group\\_by=location](https://cpj.org/data/killed/2024/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start_year=2024&end_year=2024&group_by=location).
- Committee to Protect Journalists. 2021. "Taliban fighters detain, flog, and beat journalists covering protests in Afghanistan." <https://cpj.org/2021/09/taliban-fighters-detain-flog-and-beat-journalists-covering-protests-in-afghanistan/>.
- Davenport, Christian. 2007. "State Repression and the Domestic Democratic Peace."
- Ehsan Qaane. 2022. "Regime Change, Economic Decline and No Legal Protection: What has happened to the Afghan media?" Afghanistan Analysts Network.
- Eide, Elisabeth. 2019. "Afghan Journalists in a Balancing Act: Coping with Deteriorating Security" 18 (1).
- Faiez, Rahim. 2024. "The Taliban suspend two TV stations in Afghanistan for neglecting Islamic and national values." APnews.com. <https://apnews.com/article/taliban-tv-station-suspension-c4ded51b0b4c85f77e5c14d851246a5e>.
- Freedom House. 2022. "FREEDOM IN THE WORLD 2022." <https://freedomhouse.org/country/afghanistan/freedom-world/2022>.
- Gehrig, Michelle, dan Consortium Athena. 2022. "MEDIA RESTRICTIONS AND THE IMPLICATIONS FOR GENDER EQUALITY IN AFGHANISTAN." UN Women, 9.
- GOV.UK. 2023. "Human Rights and Democracy: the 2022 Foreign,

- Commonwealth & Development Office report.” GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/human-rights-and-democracy-report-2022/human-rights-and-democracy-the-2022-foreign-commonwealth-development-office-report>.
- Human Rights Watch. 2023. “Afghanistan: Taliban’s Gender Crimes Against Humanity.” Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2023/09/08/afghanistan-talibans-gender-crimes-against-humanity>.
- Human Rights Watch. 2020. “‘You Have No Right to Complain’ Education, Social Restrictions, and Justice in Taliban-Held Afghanistan.” <https://www.hrw.org/report/2020/06/30/you-have-no-right-complain/education-social-restrictions-and-justice-taliban-held>.
- Ifran, Amol. 2024. “Afghan Women Journalists Continue To Stand Strong, 3 Years After Taliban Takeover.” Media Diversity Institute. <https://www.media-diversity.org/afghan-women-journalists-continue-to-stand-strong-3-years-after-taliban-takeover/>.
- IFJ. 2022. “Asia Pacific tops IFJ’s Killed List as deadliest region for journalists.” <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/article/asia-pacific-tops-ifjs-killed-list-as-deadliest-region-for-journalists>.
- International Federation of Journalists. 2022. “Afghanistan: TOLONews journalists detained by Taliban militants.” <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/article/afghanistan-tolonews-journalists-detained-by-taliban-militants>.
- Jan Masomy, Masom. 2022. “Afghanistan’s Media Developments and Challenges in the Past Two Decades: A Short Glance at Media Freedom.” *Reality of Politics* 19 (1): 64–77. <https://doi.org/10.15804/rop2022104>.
- Jessica Ludwig dan Albert Torres. 2024. “Corruption and Kleptocracy in Afghanistan Under the Taliban.” George W. Bush.
- Karimi, Faisal. 2024. “Afghanistan’s Media Crisis How the Taliban assaults media freedom.” JSK Fellows. <https://jskfellows.stanford.edu/afghanistans-media-crisis-f36cc12d60a3>.
- Karimi, Faisal. 2023. “Media Capture Strategies in an Islamic Authoritarian Context: The Case of the Taliban.” *Human Rights Institute*.
- Lindsay, Maizland. 2023. “The Taliban in Afghanistan.” Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgroundunder/taliban-afghanistan>.
- Michelle Gehrig dan Athena Consortium. 2022. “MEDIA RESTRICTIONS AND THE IMPLICATIONS FOR GENDER EQUALITY IN AFGHANISTAN.” UN Women.
- Mohammad. 2024. “Taliban Admission: Corruption Surges by 80 to 90 Percent in The Second Emirate.” 8am Daily. <https://8am.media/eng/taliban-admission-corruption-surges-by-80-to-90-percent-in-the-second-emirate/>.
- Moradi, Kobra. 2022. “AFGHAN MEDIA UNDER THE TALIBAN RESTRICTIONS AND VIOLATIONS.” Afghanistan Human Rights and Democracy Organization.
- Mujtaba Haris. 2024. “FREEDOM OF AFGHAN MEDIA Challenges facing Afghan journalists in Afghanistan and abroad.”
- Peter Cary. 2012. “An Explosion of News: The State of Media in Afghanistan.” CIMA.
- Reporters Without Borders. 2021a. “Afghanistan : ‘11 journalism rules’ imposed by Taliban open way to censorship and arbitrary decisions , RSF warns.”

- Reporters Without Borders. <https://rsf.org/en/afghanistan-11-journalism-rules-imposed-taliban-open-way-censorship-and-arbitrary-decisions-rsf#:~:text=Reporters%20Without%20Borders%20%28RSF%29%20is%20very%20disturbed%20by,and%20liable%20to%20be%20used%20to%20persecute%20them>.
- . 2021b. “Since the Taliban takeover, 40% of Afghan media have closed, 80% of women journalists have lost their jobs.” Reporters Without Borders. <https://rsf.org/en/taliban-takeover-40-afghan-media-have-closed-80-women-journalists-have-lost-their-jobs>.
- . 2022. “Afghan journalists increasingly harassed by Taliban intelligence and new ministry.” <https://rsf.org/en/afghan-journalists-increasingly-harassed-taliban-intelligence-and-new-ministry>.
- . 2022. “Taliban have entered a new phase of their media war with the closure of two major Afghan news websites.” <https://rsf.org/en/taliban-have-entered-new-phase-their-media-war-closure-two-major-afghan-news-websites>.
- Reporters Without Borders. 2018. “WORLDWIDE ROUND-UP of journalists killed, detained, held hostage, or missing in 2018.”
- Saddiqi, Mohammad Yousaf, dan Elif Kucuk Durur. 2022. “The Working Conditions and Challenges of Afghan Female Journalists.”
- SAHIBZADA M. USMAN. 2024. “Afghan Journalists Under Taliban Repression.” *Modern Diplomacy*. <https://moderndiplomacy.eu/2024/10/16/afghan-journalists-under-taliban-repression/>.
- Sirat, Siyar. 2025. “Afghanistan ranked world’s most authoritarian country in 2024 Democracy Index.” <https://amu.tv/160138/>.
- Troughton, John. 2022. “Press freedom in the Asia-Pacific region.” International Federation of Journalists. <https://pressfreedom.org.au/press-freedom-in-the-asia-pacific-region-bf223eea626e>.
- UNAMA. 2024. “Media Freedom in Afghanistan.”
- Weeda Mehran. 2022. “The Evolution in the Taliban’s Media Strategy.” *GW Program on Extremism*.